

# **Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Kasus Pada Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara)**

**Halens Ryanlie Ole**  
(Email : ryanlie.ole@gmail.com)

## ***Abstract***

*The purpose of this study was to obtain how to implementation of the Regional Management Information System (SIMDA) on the quality of financial reporting in the Agency of Revenue, Finance and Asset Management (DPPKAD) of Southeast Minahasa Regency.*

*This research method is qualitative research with interviews and document study taken with cross-sectional approach. Interviews performed to Southeast Minahasa District Secretary about SIMDA implementation and the survey of preparation of financial statements in DPPKAD to five respondents and in SKPD to 30 treasurers.*

*The results reveal that the use of the SIMDA process in accordance with the mandate Minister Regulation No. 13 of 2006 on Regional Financial Management Guidelines. The SKPD participation rate is still low, but participation by type of user has been pretty good. The data show that opinion of BPK is directly proportional to the increase in the use of SIMDA in the each of SKPD. Factors found to influence besides SIMDA to the quality of the financial statements is the human factor, the inspectorate, head of Regional leadership, feedback on BPK recommendations, and consistency in the application of SIMDA. Evaluations on human factors concluded that the level of human resources were classified based on aspects SIMDA educational background and the number of Bimtek. Inspectorate human resources is very good in quality but less in number in serving on SKPD. Local leaders considered quite good, the feedback of the BPK recommendation is quite good, and consistency in the application of SIMDA also been good.*

*Keywords: Implementation of SIMDA, the quality of financial reporting, SKPD, financial management.*

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sejak Pemerintah Republik Indonesia memberlakukan otonomi daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004), maka setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri, termasuk didalamnya mengenai keuangan daerah. Sejalan dengan itu Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan reformasi

pengelolaan keuangan negara dengan mengeluarkan Undang-Undang bidang keuangan Negara (UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 dan UU No 15 tentang Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara), tata cara pelaporan keuangan pemerintah yang dirasakan kurang transparan dan akuntabel telah berubah, karena sebelumnya laporan keuangan tersebut belum sepenuhnya disusun mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang sejalan dengan standar akuntansi sektor publik yang diterima secara internasional.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah atau Asset Daerah. Terjadi adanya perubahan paradigma baru dalam pengelolaan barang milik daerah atau asset daerah yang ditandai dengan di keluarkannya PP No. 6 Tahun 2006 yang merupakan peraturan turunan dari UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menimbulkan optimisme baru dalam penataan dan pengelolaan asset daerah yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan untuk kedepannya. Pengelolaan asset daerah yang professional dan modern diharapkan akan mampu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan stake holder lainnya kepada pemerintah untuk pengelolaan asset daerah. Permasalahan dalam pengelolaan asset daerah tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan dari peraturan perundang-undangan yang disebutkan diatas, namun juga dipengaruhi karena banyaknya asset daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Hal tersebut seperti yang di alami oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam hal penatausahaan asset daerah, masih banyak asset atau barang milik daerah yang belum masuk dalam data inventarisasi barang milik daerah. Permasalahan tersebut muncul akibat sistem pengelolaan asset yang masih bersifat manual. (Rizki, Luhur Nurmala. 2012)

Oleh karena itu, dalam rangka mengoptimalisasi manajemen daerah, saat ini Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan aplikasi komputer berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Tujuan dari pengembangan program aplikasi SIMDA ialah (1) menyediakan database tentang kondisi di daerah secara terpadu mulai dari aspek kepegawaian, aset daerah, keuangan hingga pelayanan publik, (2) menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah yang dapat digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan, (3) mempersiapkan aparat daerah untuk mampu menguasai dan mendayagunakan teknologi informasi, dan (4) memperkuat basisi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Program implementasi SIMDA yang telah diimplementasikan meliputi implementasi SIMDA Keuangan, SIMDA Barang Milik Daerah (BMD), SIMDA Gaji dan SIMDA Pendapatan.

Dari keterangan-keterangan yang sudah diuraikan di atas, maka dalam rangka untuk memahami permasalahan yang terkait dengan masalah Sistem informasi di daerah di kabupaten Minahasa Tenggara, maka penulis melakukan kajian studi literatur terhadap perkembangan sistem manajemen manajemen keuangan bagi pemerintah daerah. Kemudian penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan manajemen keuangan yang telah dilakukan selama ini dengan mengambil judul, ***“Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen***

***Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD : Studi Kasus Pada Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara”***

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Minahasa Tenggara?

**1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan SKPD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Minahasa Tenggara.

**1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis
  - a. Menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti mengenai implementasi sistem manajemen informasi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah
  - b. Sebagai wahana bagi peneliti untuk mengaplikasikan teori-teori yang telah dipelajari serta, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, saran dan masukan bagi SKPD di lingkungan Kabupaten Minahasa Tenggara dalam rangka mengoptimalkan penerapan sistem informasi manajemen daerah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

**1.5 Metode Penelitian**

**1.5.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus (*case study*). Penelitian studi kasus bertujuan untuk mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalam dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi. Creswell mendefinisikan studi kasus sebagai suatu eksplorasi dari sistem-sistem yang terkait (*bounded system*) atau suatu kasus. (Raco. J.R. 2010)

**1.5.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi penelitian di Kantor Dinas DPPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara Propinsi Sulawesi Utara. Adapun pelaksanaan penelitian dilakukan dari bulan September sampai dengan Oktober tahun 2014.

**1.5.3 Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah Pejabat dan para staf di lingkungan Dinas DPPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 pada Pasal 5 ayat 3 adalah Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah (KPKD) dan Staf Bidang Pelaporan Keuangan sebagai responden penelitian.

#### **1.5.4 Jenis dan Sumber Data**

Data dalam penelitian ini ada dua yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data berupa informasi langsung yang didapat dari subjek/responden penelitian, sedangkan data sekunder adalah data yang sifatnya dokumentasi. Data primer didapatkan dari Pejabat dan para staf pada Dinas PPKAD yang ditentukan sebagai responden penelitian. Data sekunder berupa dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2008 – 2013.

#### **1.5.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner.

#### **1.5.6 Metode Analisis**

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Analisis data berbeda dengan penafsiran data. Analisis data lebih memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif. Dalam analisis kualitatif, langkah-langkah analisis yang sering digunakan untuk memahami komponen-komponen data adalah melalui (1) reduksi data, (2) penyajian data dan (3) menarik kesimpulan/verifikasi (Miles and Huberman, 1994: 10). Reduksi data merujuk pada proses pemilihan dan pemilahan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*).

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)**

Secara umum, Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan suatu sistem yang dapat membantu manajemen di dalam pengumpulan data, pengolahan serta analisis evaluasi data dan menyajikan ke dalam batas informasi yang bernilai dan akhirnya sampai pada pengambilan keputusan di mana informasi ini berguna untuk mendukung fungsi operasi manajemen (Machmud, Rizan. 2013).

Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan dikenal dengan Aplikasi SIMDA merupakan salah satu produk dari teknologi sistem informasi yang digunakan oleh banyak pemerintah daerah di Indonesia dalam menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerahnya. Menurut Djaja dalam (Budiman, Fuad dan Arza, Fefri Indra. 2013), Aplikasi SIMDA merupakan aplikasi database yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Aplikasi SIMDA dikembangkan dengan memperhatikan dan mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh sebab itu pengendalian terhadap aplikasi menjadi suatu keharusan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Aplikasi SIMDA untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

### 2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan SKPD

Halim Abdul (2007) menyatakan bahwa Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pengertian ini tidak berbeda jauh dengan pengertian sebagaimana dijelaskan dalam Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di mana dalam peraturan tersebut dijelaskan pengertian Keuangan daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut.

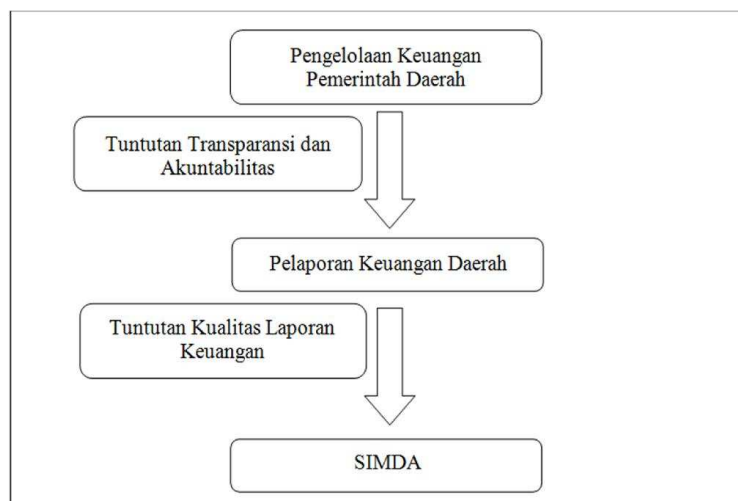
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dinyatakan adanya 8 Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Kedelapan prinsip tersebut adalah Basis akuntansi, Nilai historis, Realisasi, Substansi mengungguli bentuk formal, Periodisitas, Konsistensi, Pengungkapan lengkap, Penyajian wajar.

Indra Bastian (2009: 94-96) menyatakan bahwa kualitas keuangan dapat diukur berdasarkan karakteristik diantaranya: (1) dapat dipahami, (2) relevan, (3) materialitas, (4) keandalan/reliabilitas, (5) penyajian jujur, (6) substansi mengungguli bentuk, (7) netralitas, (8) pertimbangan sehat, (9) kelengkapan, dan (10) dapat dibandingkan. Untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas maka penggunaan sistem informasi manajemen sangat diperlukan untuk mengurangi ketidaktepatan dan tingkat kesalahan dalam penyusunan laporan. Salah satu misi dalam penerapan SIMDA ialah meningkatkan kinerja pengelola keuangan di tiap-tiap SKPD dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, bebas dari segala tindakan yang menjurus ke arah kolusi korupsi dan nepotisme.

### 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gb. 2 sebagai berikut:

**Gambar 1 Kerangka Pemikiran Penelitian**



Sumber: data olahan

Kerangka pemikiran tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik dan pembangunannya, pemerintah Daerah memiliki kewenangan mengelola keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut harus memenuhi azas transparansi dan akuntabilitas, dan hal itu dimanifestasikan dalam bentuk Laporan Keuangan Daerah. Pelaporan keuangan daerah harus memenuhi syarat-syarat kualitas laporan keuangan yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, penggunaan SIMDA diharapkan dapat meningkatkan kualitas isi laporan keuangan daerah tersebut.

### **3 Gambaran Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara**

#### **3.1 Gambaran Umum Kabupaten Minahasa Tenggara**

Luas wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara adalah 730,62 Km<sup>2</sup> atau 73.062 Ha, yang secara administratif terbagi menjadi 12 kecamatan. Kecamatan terluas adalah kecamatan Ratatotok dengan luas 10.418 Ha yang kemudian diikuti oleh Kecamatan Touluaan Selatan dengan luas 10.180 Ha, sedangkan Kecamatan Tombatu Timur sebagai kecamatan yang terkecil dengan luas 1.881 Ha serta Kecamatan Tombatu Utara dengan luas 3.717 Ha. Ibu Kota Kabupaten Minahasa Tenggara adalah Ratahan yang berjarak 80 km dari Manado. Secara geografis, Kabupaten Minahasa Tenggara terletak antara : 1240 30'24" – 1240 56'24" BT, 10 08'19" – 00 50'46" LU.

#### **3.2 Gambaran Umum Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di Kabupaten Minahasa Tenggara**

Dalam penerapan *IT Governance* tidak semua Sistem Informasi berhubungan dengan Laporan Keuangan artinya menghasilkan Data sumber pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini tergambar pada tabel 8 dibawah ini.

**Tabel 1 Sistem Informasi Teknologi yang Diterapkan Berdasarkan Produk Data pada Laporan Keuangan**

NO	NAMA SISTEM INFORMASI TEKNOLOGI	NAMA SISTEM	PRODUK DATA PADA LAPORAN KEUANGAN
1	Sistem Informasi Kepegawaian	SIMPEG	-
2	Sistem Informasi Gaji	SIMDA GAJI	Data Gaji Pegawai pada Belanja Pegawai
3	Sistem Informasi Aset	SIMDA ASET	Data Barang Milik Daerah pada Belanja Modal dan Aset Tetap
4	Sistem Informasi Keuangan	SIMDA KEUANGAN	LRA, NERACA, LAK, Laporan Pertanggungjawaban, Laporan APBD dan APBDP
5	Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	SPSE	-

Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Untuk menjamin kelancaran Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan untuk tertibnya pengelolaan administrasi serta menerapkan secara optimal Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Minahasa Tenggara maka Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara menerbitkan Surat Keputusan Bupati nomor 89 Tahun 2014 Tanggal 21 Maret 2014 tentang Batasan

dan Otoritas Identitas Pengguna Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara

#### **4. ANALISIS DAN EVALUASI**

##### **4.1 Analisis**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Tingkat Implementasi SIMDA**

###### **1.Sasaran dan Tujuan Pelaksanaan SIMDA**

Sasaran pelaksanaan SIMDA pada SKPD di Kabupaten Minahasa Tenggara adalah agar setiap SKPD dapat melaksanakan SIMDA sebaik-baiknya. Sementara itu, tujuan yang ingin dicapai adalah agar SIMDA mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

###### **2. Tingkat pemakaian kebijakan SIMDA**

Pemerintah daerah Minahasa Tenggara mulai melaksanakan SIMDA pada tahun 2007, saat kabupaten ini berdiri. Lewat asistensi dari BPKP, pemerintah daerah mulai melaksanakan aplikasi SIMDA. Idealnya, SIMDA dijalankan mulai dari penganggaran, penatausahaan, hingga laporan keuangan. Walau begitu, hingga tahun 2008, SIMDA baru efektif pada level penganggaran. Level penganggaran memerlukan masukan berupa pembuatan RKA (Rencana Kerja dan Anggaran). Satu tahun kemudian, selain penganggaran, penatausahaan juga telah menerapkan SIMDA. Penatausahaan memerlukan masukan yang lebih banyak yaitu SPD (Surat Penyediaan Dana), SPP (Surat Permintaan Pembayaran), SPM (Surat Perintah Membayar), dan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana). Langkah ini merupakan langkah yang baik karena setahun kemudian, keluar PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang baru, menggantikan PP No 24 tahun 2005. Dalam SAP baru ini, pemerintah pusat maupun daerah harus mengganti CTR menjadi akuntansi akrual penuh selambat-lambatnya tahun 2015. Tahun 2014, semua SKPD di Kabupaten Minahasa Tenggara telah melaksanakan SIMDA secara efektif hingga pada level laporan keuangan.

###### **3. Ketersediaan Sarana SIMDA**

Sarana yang diperlukan dalam implementasi SIMDA tergolong sederhana. Sarana yang diperlukan hanya berupa komputer, aplikasi SIMDA, dan jaringan internet. Aplikasi SIMDA diinstalasikan ke dalam komputer sesuai petunjuk pemakaian yang dikeluarkan oleh BPKP. Setelah instalasi, komputer harus dikoneksikan ke server lewat jaringan internet. Server SIMDA berada di Dinas PPKAD. PPKAD menjadi lokasi server karena dinas ini yang langsung menangani sistem informasi keuangan daerah tersebut. SKPD kemudian datang ke dinas PPKAD untuk mendapatkan nama pengguna dan kata kunci untuk masuk ke dalam server. Karena sarana yang diperlukan tergolong sederhana, maka sarana-sarana ini sepenuhnya tersedia pada SKPD-SKPD.

###### **4. Proses-Proses dalam SIMDA**

Semua proses yang terjadi di dalam mekanisme penyusunan laporan keuangan lewat SIMDA merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. a. Proses Penyusunan RKA, b. Proses Penyusunan DPA, c. Proses Pembuatan Anggaran Kas, d. Proses Pergeseran Anggaran, e. Proses Perubahan Anggaran.

#### **4.1.2 Kemampuan Kerja SDM SIMDA**

##### **1. Kualitas dan Kuantitas SDM untuk Pelaksanaan SIMDA**

Pengguna SIMDA terdiri dari beberapa level mulai dari operator berupa 44 PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), 45 bendahara pengeluaran, dan sembilan bendahara pendapatan, serta lima pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan satu Auditor dari Inspektorat, supervisor dari seorang pejabat pengelola keuangan daerah, administrator dari dua orang pejabat pengelola keuangan daerah. Total SDM yang terlibat sebagai pengguna SIMDA adalah sebanyak 107 pengguna. Berdasarkan sampel dari 30 orang bendahara, ditemukan bahwa mayoritas pendidikan pegawai adalah S1. Terdapat pula bendahara dengan latar magister dan ini berada pada SKPD inspektorat. Sementara itu, pada SKPD BLHKP dan BKDD memiliki bendahara lulusan diploma, dan pada KAP, DESDM, dan KPP memiliki bendahara lulusan SMK. Hanya ada satu berlatar pendidikan TI yaitu bendahara Dukcapil yang merupakan sarjana komputer. Begitu pula, hanya ada tiga bendahara dengan latar akuntansi yaitu bendahara DPPKAD, Sekda, dan PU. Mayoritas merupakan sarjana di bidang manajemen.

Dengan profil SDM seperti ini, narasumber berargumen bahwa pada dasarnya pendidikan bukanlah masalah. Karena SIMDA dirancang dengan interface yang baik, asalkan individu mau belajar maka ia dapat memahami dan menggunakan SIMDA. Hal ini terlebih lagi adanya dilema antara dasar pendidikan TI dengan dasar pendidikan akuntansi. Seorang pengguna dengan latar TI mungkin dapat sangat memahami SIMDA namun kurang paham dalam segi akuntansi. Sementara itu, seorang pengguna dengan latar akuntansi dapat bermasalah dengan TI. Karenanya, latar pendidikan tidak terlalu diutamakan tetapi aspek yang lebih diutamakan adalah aspek diklat.

##### **2. Tingkat Pengalaman Pegawai dalam Pelaksanaan SIMDA**

Pengalaman pegawai dalam pelaksanaan SIMDA tergantung dari usia kerja mereka pada tugas SIMDA. Karena Kabupaten Minahasa Tenggara adalah kabupaten yang baru terbentuk enam tahun lalu, maka paling lama pengalaman pegawai dalam pelaksanaan SIMDA adalah enam tahun. Waktu ini menurut narasumber sudah dapat digolongkan sedang untuk memberikan pengalaman bagi pegawai. Pengalaman yang terlalu baik justru tidak diharapkan karena dapat memunculkan bahaya berupa peretasan atas SIMDA. Pengalaman tinggi hanya diharapkan dari pengguna yang bertugas sebagai administrator saja, yang terdiri dari dua orang yaitu kepala bidang akuntansi dan kepala bidang anggaran dari dinas PPKAD. Sementara itu, pada tingkat operator, pengalaman yang diperlukan hanya dalam bentuk kesesuaian dengan SOP. Hal ini karena ruang gerak operator terbatas dan hanya dapat mengakses SPT, SPM, dan lainnya pada tingkat SKPD masing-masing. Hanya pengguna di dinas PPKAD yang dapat mengakses untuk tingkat SKPAD.

##### **3. Program Pengembangan SDM lewat Diklat (Bimtek) SIMDA**

Karena tidak bertopang pada latar pendidikan formal, maka kompetensi dari SDM SIMDA harus bertopang pada kinerja diklat. Hal pertama yang diajarkan adalah bagaimana menggunakan SIMDA. Pelatihan dasar ini mencakuplah cara menginput data anggaran dan penatausahaan, cara membuat laporan, cara melakukan peninjauan, dan cara melakukan analisis. Pelatihan dilakukan oleh



pemerintah daerah dengan berkoordinasi dengan BPKP sebagai pemegang hak cipta dari SIMDA. Pelatihan dilakukan pada seluruh pengguna SIMDA, termasuk PPK. PPK dilibatkan karena ia diperlukan untuk melakukan pengesahan mengenai kesesuaian data yang dimasukkan bendahara dalam SIMDA. Diklat dilakukan setiap tahun sebanyak dua hingga tiga kali.

Data sampel bendahara sebanyak 30 orang menunjukkan bahwa mayoritas (14 orang) jumlah Bimtek Simda yang telah diikuti adalah sebanyak 2 kali bimtek. Terdapat dua orang bendahara yang belum pernah mengikuti bimtek yaitu dari Sekretariat DPRD dan Kesbangpol. Sementara itu, satu bendahara, yaitu dari Sekretariat Korpri, telah mengikuti bimtek SIMDA hingga enam kali.

#### **4.1.3 Tingkat Partisipasi dalam Implementasi SIMDA**

##### **1. Tingkat Partisipasi SKPD**

Proses umpan balik dalam penggunaan SIMDA ditemukan hanya beberapa saja SKPD yang aktif. Menurut laporan narasumber, hanya ada tiga SKPD aktif yaitu dinas PPKAD, Sekretaris Daerah, dan Dinas Kehutanan. Tiga SKPD ini aktif dalam memberikan masukan jika ada program yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Sebagai contoh, masukan pernah datang dari pengendalian dana kas daerah. Dalam SIMDA ia hanya berupa jurnal, sementara pengguna memerlukan keluaran dalam bentuk SPM.

##### **2. Tingkat Partisipasi SDM**

Dilihat dari SDM, terdapat tingkat perbedaan partisipasi antara bendahara dengan PPK. PPK dipandang kurang berpartisipasi karena telah berumur. Terdapat sebuah celah generasi yang membuat mereka tidak terlalu aktif dalam menggunakan teknologi komputer. Mereka berusia antara 40 hingga 50 tahunan yang berarti lahir pada era manual. Sementara itu, para bendahara berusia rata-rata lebih muda. Rata-rata baru berusia 31 tahun dengan usia termuda 23 tahun dan tertua 40 tahun. Mereka lahir dan besar dalam era komputerisasi dan karenanya lebih mengerti teknologi informasi. Perbedaan ini terlihat dalam perilaku terhadap SIMDA. Para bendahara memasukkan sendiri data ke dalam SIMDA. Sementara itu, PPK hanya mewakili pada staff atau bendahara tersebut. Hanya sedikit PPK yang mau memasukkan sendiri data ke dalam SIMDA. Hal ini semestinya tidak demikian karena PPK berperan dalam memberikan pengesahan menggunakan SIMDA. Akibatnya, pengesahan ini dilakukan umumnya lewat perwakilan atau bahkan dapat disahkan sendiri oleh bendahara atas nama PPK.

#### **4.1.4 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Implementasi SIMDA di SKPD Kabupaten Minahasa Tenggara dilaksanakan sejak akhir tahun 2008. Sebelumnya, proses pembuatan laporan keuangan dilakukan secara manual. Proses pembuatan laporan keuangan secara manual ini tidak langsung menghasilkan laporan keuangan maupun jurnal. Selain itu, sulit untuk melihat segera jumlah pengeluaran karena harus diperiksa ke setiap laporan SKPD. Akibatnya, hal ini membutuhkan perhitungan kembali.

#### **4.2 Evaluasi Data**

##### **4.2.1 Hubungan antara Implementasi SIMDA terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Untuk melihat kemampuan SIMDA dalam memberikan laporan keuangan yang berkualitas secara lebih teliti, peneliti membagikan sebuah kuesioner yang

mengukur kualitas laporan keuangan pada para pejabat di lingkungan Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa. Kuesioner terdiri dari 13 item yang mengukur delapan indikator dari empat dimensi kualitas laporan keuangan. Dimensi yang digunakan mencakup enam dari 10 dimensi kualitas laporan keuangan menurut Bastian (2009:94-96) yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, penyajian jujur, kelengkapan, dan dapat dibandingkan. Lima dimensi ini dikelompokkan dalam empat dimensi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang mendaftarkan empat dimensi yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Keempat dimensi ini dapat ditarik dari teori kualitas laporan keuangan yang dinyatakan oleh Cramer dan Thomas (1969 dalam Abubakar, 2011:4). Empat dimensi ini kemudian diadopsi oleh IASC (International Accounting Standards Committee) (Gu dan Li, 2011:202) dan ditransfer pada PP No 71 tahun 2010. Relevansi dan reliabilitas tergolong sebagai kualitas fundamental, sementara dapat dibandingkan dan dapat dipahami tergolong kualitas penguat (Agyei-Mensah, 2013:270). Penyajian jujur digolongkan sebagai dimensi keandalan sementara kelengkapan tergolong pada dimensi relevan.

#### a. Kelengkapan

Indikator kelengkapan dalam penelitian ini diukur dengan pernyataan bahwa “Melalui SIMDA Data laporan keuangan dinas dapat diperoleh secara lengkap”. Seluruh responden sepakat untuk setuju dengan pernyataan ini. Karenanya, dapat disimpulkan bahwa efek SIMDA pada kelengkapan laporan keuangan tergolong baik.

#### b. Manfaat Umpan Balik

Indikator manfaat umpan balik dalam penelitian ini diukur dengan pernyataan bahwa “Melalui SIMDA Data yang ada dapat digunakan untuk memantau posisi keuangan dinas dan menilai kinerja dinas”. Kembali semua responden setuju dengan pernyataan ini. Karenanya, dapat disimpulkan bahwa efek SIMDA pada kemampuan pemantauan posisi keuangan dan penilaian kinerja dinas tergolong baik.

#### c. Manfaat Prediktif Pengambilan Keputusan

Indikator manfaat prediktif pengambilan keputusan dalam penelitian ini diukur oleh dua item yaitu “informasi yang dihasilkan dapat mendukung proses pengambilan keputusan” dan “informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk analisis laporan keuangan lebih lanjut.” Untuk pernyataan tentang kemampuan SIMDA mendukung proses pengambilan keputusan, empat orang menyatakan setuju, dan satu orang menyatakan sangat setuju. Sementara itu, untuk pernyataan tentang kemampuan SIMDA mendukung analisis laporan keuangan lebih lanjut, dua orang setuju, satu sangat setuju, dan dua tidak setuju. Jika dirata-ratakan dari kedua item, maka dapat diperoleh bahwa secara umum, responden setuju bahwa SIMDA memberikan manfaat prediktif dalam pengambilan keputusan berdasarkan laporan keuangan yang dihasilkan SIMDA

#### d. Ketepatan Waktu

Indikator ketepatan waktu dalam penelitian ini diukur oleh dua item yaitu “Informasi dapat diperoleh saat dibutuhkan” dan “penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan tepat waktu sesuai dengan deadline yang telah ditentukan”. Untuk

kemampuan SIMDA memberikan informasi saat diperlukan, tiga dari lima responden menyatakan sangat setuju sementara sisanya setuju. Sementara itu, untuk kemampuan SIMDA dalam membantu penyusunan laporan keuangan tepat waktu sesuai deadline memberikan pendapat yang lebih negatif. Tiga justru menyatakan tidak setuju dan hanya dua yang menyatakan setuju. Walau begitu, jika dirata-ratakan, maka kemampuan SIMDA dalam memberikan ketepatan waktu tergolong baik.

#### **Keandalan**

Kehandalan, seperti halnya relevansi, merupakan dimensi kualitas laporan keuangan berbasis pasar (Cascino et al, 2010:17). Laporan keuangan harus handal sehingga dapat mencerminkan fundamental ekonomi yang berada di balik lembaga (Cascino et al, 2010:7). Selain itu, kehandalan juga diperlukan bagi stakeholder untuk meyakinkan mereka bahwa pejabat menjalankan organisasi sesuai dengan kepentingan stakeholder (Hamid dan Abdullah, 2012:144). Dengan melihat dimensi kehandalan, kita dapat meyakini bahwa laporan keuangan benar-benar mencerminkan kinerja keuangan dari SKPD. Menurut Cramer dan Thomas (dalam Abubakar, 2011:4), laporan keuangan dipandang handal jika mencerminkan realitas dan substansi transaksi dan peristiwa, bebas dari penyimpangan dan kesalahan material, lengkap, dan ketika muncul ketidakpastian, terdapat prinsip kehati-hatian yang digunakan untuk menyatakan penilaian dan prinsip ini dinyatakan secara eksplisit.

##### **a. Penyajian Jujur**

Penyajian jujur dalam penelitian ini dilihat dari pernyataan bahwa “informasi yang dihasilkan dapat dipercaya”. Seluruh responden sepakat untuk setuju bahwa informasi yang dihasilkan SIMDA dapat dipercaya. Karenanya dapat disimpulkan bahwa SIMDA memberikan kemampuan laporan keuangan untuk dipercaya dengan baik.

##### **b. Dapat Diverifikasi**

Kemampuan verifikasi laporan keuangan dalam penelitian ini dilihat dari dua indikator yaitu “Data yang diinput di SIMDA melalui proses Verifikasi dahulu” dan “pengolahan data transaksi menjadi laporan keuangan dapat dilakukan dengan benar melalui proses rekonsiliasi laporan.” Dalam hal proses verifikasi sebelum memasukkan data ke SIMDA, dua responden menyatakan sangat setuju sementara tiga lainnya setuju. Sementara itu, untuk proses rekonsiliasi laporan untuk pengolahan data transaksi menjadi laporan keuangan, hanya satu yang menyatakan sangat setuju. Empat lainnya menyatakan setuju. Hal ini bermakna bahwa secara umum, indikator dapat diverifikasi tergolong baik.

#### **Dapat dibandingkan**

Indikator dapat dibandingkan dalam penelitian ini didekati oleh dua item yaitu “Laporan keuangan yang dihasilkan melalui SIMDA dapat dilihat untuk 3-5 tahun terakhir” dan “Laporan keuangan yang dihasilkan dapat dilihat dan dibandingkan pencapaian masing-masing per SKPD”. Untuk kemampuan SIMDA memberikan laporan keuangan dalam tiga hingga lima tahun terakhir, empat responden menyatakan tidak setuju dan hanya satu yang menyatakan setuju. Sementara itu, untuk kemampuan melihat dan membandingkan pencapaian masing-masing SKPD berdasarkan laporan keuangan dari SIMDA, empat responden menyatakan

setuju dan satu orang menyatakan sangat setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan SIMDA dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelapor lain pada umumnya (Adhi dan Suhardjo, 2013).

#### **Dapat dipahami**

Indikator dapat dipahami dalam penelitian ini didekati oleh dua item yaitu “Laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan” dan “Aplikasi SIMDA memberikan tambahan Laporan keuangan yang dapat dimodifikasi sesuai dengan permintaan SKPD (agar mudah dimengerti)”. Untuk pernyataan tentang kesesuaian laporan keuangan dengan SAP, seluruh responden menyatakan setuju. Sementara itu, untuk pernyataan tentang kemampuan SIMDA memberikan laporan keuangan yang dapat dimodifikasi, seluruh responden justru menyatakan tidak setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan SIMDA relatif dapat dipahami oleh pengguna dan relatif dapat dipanyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna (Adhi dan Suhardjo, 2013).

#### **Kualitas Laporan Keuangan secara keseluruhan**

Secara keseluruhan, dimensi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh SIMDA dapat dilihat dari masing-masing dimensi kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan SIMDA cukup berguna karena memuat isi informasi berdasarkan standar kualitatif yang ada.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Hasil penelitian diketahui bahwa proses penggunaan SIMDA telah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun Tingkat partisipasi penggunaan SIMDA berdasarkan SKPD masih rendah. Ini ditunjukkan oleh hanya tiga SKPD yang aktif dalam memberikan saran perbaikan berdasarkan kuesioner yang dijalankan. Tingkat partisipasi berdasarkan jenis pengguna masih rendah. PPK masih belum berpartisipasi karena telah berusia lanjut dan kurang antusias dalam menggunakan teknologi informasi. Dari hasil wawancara juga disimpulkan bahwa dengan Implementasi SIMDA pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai berikut.

1. Aplikasi SIMDA Keuangan mampu menghasilkan informasi dengan ketepatan atau tingkat kebenaran yang lebih baik bila dibandingkan dengan pengolahan data manual.
2. Membantu Pimpinan (Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran) dalam mengambil keputusan sesuai data dan informasi yang ada.
3. Sistem Pengendalian Intern berjalan dengan baik dimulai dari Penganggaran, Penatausahaan sampai pada pelaporan.

Faktor-faktor yang ditemukan selain SIMDA terhadap kualitas laporan keuangan adalah faktor SDM, inspektorat, kepemimpinan kepala daerah, umpan balik terhadap rekomendasi BPK, dan konsistensi dalam penerapan SIMDA. Evaluasi pada faktor SDM menyimpulkan bahwa tingkat SDM SIMDA tergolong sedang berdasarkan aspek latar belakang pendidikan dan jumlah bimtek. Inspektorat dari segi SDM secara kualitas sangat baik namun secara kuantitas masih kurang jumlahnya dalam melayani SKPD. Kepemimpinan daerah dinilai cukup baik, umpan balik terhadap rekomendasi BPK cukup baik, dan konsistensi dalam penerapan SIMDA juga telah baik. **6.2**

## **Saran**

### **5.2 Saran**

Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. SKPD, khususnya PPK, harus lebih memperhatikan SIMDA. Hal ini penting karena PPK berperan dalam verifikasi laporan keuangan.
2. Kepala Daerah harus menambah jumlah tenaga inspektorat untuk SKPD. Hal ini perlu karena terdapat kekurangan jumlah tenaga inspektorat untuk SKPD di Kabupaten Minahasa Tenggara.

## **Daftar Pustaka**

- Abubakar, S. (2010). Regulation and the economics of corporate financial reporting in Nigeria. *Journal of Management and Enterprises Development*, 7 (2), 65 – 72.
- Adediran, S.A., Alade, S.O., Oshode, A.A. 2013. Reliability of Financial Reporting and Companies Attribute: The Nigerian Experience. *Research Journal of Finance and Accounting*, 4(16), 108-115
- Adhi, Daniel Kartika dan Suhardjo, Yohanes. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tual). *Jurnal STIE Semarang*. 5(3), 93-111
- Agyei-Mensah, B. 2013. Adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) in Ghana and the Quality of Financial Statement Disclosures. *International Journal of Accounting and Financial Reporting*, 3(2), 269-286
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2014. Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), <http://www.bpkp.go.id/sakd/konten/333/Versi-2.1.bpkp>, diakses tanggal 27 Juni 2014
- Bratton, W.W. 2007. Private Standards, Public Governance: A New Look at the Financial Accounting Standards Board. *University of Pennsylvania Law School Faculty Scholarship Paper* 863
- Budiman, Fuad dan Arza, Fefri Indra. 2013. Pendekatan Technology Acceptance Model dalam Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah. *Jurnal WRA*, 1(1), 87-110
- Cascino, S., Pugliese, A., Mussolino, D., Sansone, C. 2010. The Influence of Family Ownership on the Quality of Accounting Information. *Family Business Review*, 23, 246-265

- Chalid, Pheni. 2005. *Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi*. Jakarta: Kemitraan Untuk Tata Pemerintahan yang Baik
- Fajonyomi, B., Kehinde, J.S. 2013. International Financial Reporting Standard: Principle, Practice and Prospect. *International Journal of Humanities and Social Science*, 3(20), 147-151
- Gu, X., Li, X. 2012. How to Improve the Quality of Accounting Information Based on the Corporate Governance. *M&D Forum*, 201-208
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Hamid, M.A., Abdullah, A. 2012. Influence of Corporate Governance on Audit and Non-Audit Fees: Malaysian Evidence. *Journal of Business and Policy Research*, 7(3), 140-158
- Indra Bastian. 2009. *Akutansi untuk LSM dan Partai Politik*. Jakarta: Erlangga
- Jogiyanto HM. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*, edisi Revisi, Yogyakarta: ANDI.
- Hardiawan, Revan, dkk., 2012. Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Versi 2.1 di Bappeda Kabupaten Kepahiang (Studi Deskriptif Kualitatif). *The Manager Review: Jurnal Ilmiah Manajemen*. 13(1), 38-50
- Husein, Muh. Fakri dan Amin Wibowo, 2002, *Sistem Informasi Manajemen*, Edisi Revisi, Yogyakarta, AMP YKPN
- Kallob, D.A.M. 2013. *Using the Information Qualitative Characteristics in Measuring the Quality of Financial Reporting of the Palestinian Banking Sector*. Master Thesis. Islamic University of Gaza
- Machmud, Rizan. 2013. Hubungan Sistem Informasi Manajemen dan Pelayanan dengan Kinerja Pegawai pada Rutan Makassar. *Jurnal Capacity STIE AMKOP Makassar*. 9(1), 78-85
- Marimin, Hendri Tanjung dan Haryo Prabowo. 2006. *Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grasindo
- Mohune, Cipmawati. 2013. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo). *Jurnal KIM Fakultas Ekonomi & Bisnis*. 1(1), 1-16
- Nugraha, Harmadhani Adi dan Astuti, Yuli Widi. 2013. Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) dalam Pengolahan Data Keuangan pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Akuntansi Aktual*. 2(1), 25-33
- Padmowati, Sri. 2004. *Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah di Kabupaten Jepara (Hubungan Antara Variabel Pendidikan dan Latihan, Partisipasi Pegawai serta Kemampuan Kerja dengan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah)*. Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro Semarang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Raco, Jozef. 2010 *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)* Jakarta: Grasindo
- Radityo, Dody dan Zulaikha. 2007. Pengujian Model DeLone and McLean Dalam Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (Kajian Sebuah Kasus). *Simposium Nasional Akuntansi X : Ikatan Akuntan Indonesia*.

- Richard, B.J. 2011. Accounting Information System, Financial Decentralization, and Quality of Financial Reporting in Kampala City Council. Master Thesis. Makerere University
- Rizki, Luhur Nurmala. 2012. Penatausahaan Asset pemerintah Daerah Melalui Sistem Informasi manajemen Barang Daerah (SIMBADA) di kabupaten Malang. *Journal of Public Administration Research (JOPAR)*, Vol 1, No.1, hal. 91-99
- Saraswati, Rosita Ayu. 2012. Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektivitas Pemberian Kredit pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung. *Jurnal Nominal*. Vol. 1, No. 1. Halaman 1-13
- Sugiono, Arief dan Untung, Eddy. 2008. *Panduan Praktis Dasar Analisa Laporan Keuangan Pengetahuan Dasar Bagi Mahasiswa dan Praktisi Perbankan*. Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasmara Indonesia
- Yuliani, Safrida, dkk., 2010. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*. Vol. 3, No. 2. Halaman 206-220.

**Prosedur Penghimpunan Dana tabungan Shar-e  
Dan Penyajian Laporan Keuangan Pada  
Bank Muamalat Cabang Manado**

Nur Fitry Latief  
(Email : nur.fitry@gmail.com)

***Abstract***

*This study is a continuation of the study authors in 2008 that have not been issued with a variable and the same research object and aimed to evaluate the extent to which procedures Savings Fund Raising Shar-E run in the operational activities of savings products Shar-E so that later on when the financial statements of banks Muamalat published in accordance with the rules laid down in Requirements financial accounting standards (SFAS) No. 59 of accounting Islamic banking is executed.*

*The method used by the writer is descriptive research method with the primary data source (directly observed activities of employees of the accounting) and some secondary data (in the form of financial statements) whose purpose is to describe the state of the operational procedures of Muamalat bank branches serving customers Manado in savings products Shar -E and customer data entry system to the software to generate financial data in accordance with IAS 59, resulting in the presentation of the financial statements at the end of the closing presentation of the financial report that can be justified and the information presented is clear and fair information. While the techniques used were observation and interviews.*

*The research result shows that the system of Accounting at Bank Muamalat branch Manado related savings fund raising procedures Shar-E has followed the procedures established and consistently until now. This suggests that the Bank Muamalat Manado Branch has implemented rules contained in IAS (SFAS) No. 59 on Accounting for Islamic Banking theoretically.*

*Keywords: Procedures, Savings Fund Raising Shar-E and Presentation of Financial Statements.*

**1. Pendahuluan**

Kehidupan bisnis perbankan Syariah sangat ditentukan berjalan tidaknya produk-produk yang dijual kepada nasabah. Kesemuanya ini sangat dipengaruhi oleh situasi prosedur produk yang dikembangkan dan dijalankan. Di dalam prosedur operasional Bank Syariah dapat dibedakan menjadi dua kelompok umum yaitu : prosedur kelompok produk penghimpunan (pengarahan) dana dan prosedur kelompok produk penyaluran dana atau pembiayaan.

Sehubungan dengan prosedur penghimpunan dana tabungan dalam hal ini produk tabungan Shar-E, maka tujuan penulis mengadakan penelitian adalah untuk mengevaluasi sejauh mana prosedur itu dijalankan dalam kegiatan operasional tabungan Shar-E sehingga nantinya pada saat laporan keuangan bank muamalat diterbitkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam persyaratan



standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah, dan laporan keuangan yang disajikan dapat memberikan informasi yang jelas bagi masyarakat penggunaannya.

## 2. Tinjauan Pustaka

*Prosedur* menurut kamus bahasa Indonesia adalah cara kerja sesuatu atau kegiatan yang langsung pada suatu objek yang dilaksanakan terus menerus secara berkesinambungan, sedangkan prosedur penghimpunan dana adalah petunjuk rinci tentang cara kerja mengenai pengumpulan dana tabungan yang harus diperoleh pada suatu saat selama periode berjalan.

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam membentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional adalah terletak pada kegiatan usahanya yang tidak berdasarkan bunga (*interest free*), tetapi berdasarkan prinsip syariah yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle* atau *PLS Principle*) atau bagi hasil.

Bank Syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian (akad) berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana, pembiayaan, kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai syariah.

Akad adalah pernyataan keterikatan antara bank syariah dan nasabah yang merupakan dasar untuk melakukan transaksi di bank syariah. *Tanpa akad* maka seluruh transaksi yang dilakukan *tidak sah* menurut syariah Islam. Oleh karena itu maka semua transaksi dalam perbankan syariah harus dimulai dengan akad antara bank syariah dengan nasabahnya.

Bank syariah pada dasarnya sama dengan bank komersial lainnya yang sudah ada selama ini, berlaku untuk semua lapisan kalangan masyarakat, hanya saja dalam kegiatan operasionalnya bank syariah itu berdasarkan pada prinsip syariah.

Kegiatan dan karakteristik bank syariah menurut Sholihin Hasan (seorang pejabat pada bank Islam di Jeddah) bahwa “kegiatan usaha perbankan Islam meliputi semua kegiatan konvensional kecuali pinjaman dengan bunga. Ia menerima simpanan dan memberikan pinjaman, tetapi tidak menerima dan membayar bunga, yang dikutip oleh Muh. Zuhri dalam bukunya yang berjudul Riba dalam Al Qur’an dan Masalah Perbankan yang dipublikasikan oleh Penerbit PT. Raja Grafindo Persada tahun 1996 halaman 159. Sama halnya dengan pendapat Mohammad Arif (dosen university of malaya) dalam Islamic Banking, Asian-pasific economic literature, vol 2, No. 2 (september 1988), halaman 52 mengatakan bahwa perbankan Islam dapat memberikan jasa-jasa lebih daripada yang dapat diberikan oleh bank konvensional. Menurut muhammad Arif. f, “*It is clear... that Islamic banking goes beyond the pure financing activities of conventional banks. Islamic banks engage in equity financing and trade financing*”.

Adalah keliru apabila ada yang memiliki persepsi bahwa jasa-jasa perbankan berkaitan dengan ritual keagamaan dari agama Islam. Jasa-jasa perbankan Islam sama sekali tidak ada kaitannya dengan ritual keagamaan. Oleh karena itu, bank syariah boleh memberikan fasilitas pembiayaan atau jasa-jasa perbankan syariah yang lainnya kepada nasabah yang bukan beragama Islam (Nasabah Non-Muslim).

Karakteristik Bank Syariah meliputi :

1. Universal yaitu diperuntukkan bagi semua orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi maupun perbedaan agama.
2. Adil yaitu memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya dan melarang adanya unsure maysir (unsur spekulasi atau untung-untungan), gharar (ketidakjelasan), haram dan riba.
3. Transparan yaitu dalam kegiatan operasional Bank Syariah sangat terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat.
4. Seimbang yaitu mengembangkan sector keuangan melalui aktivitas perbankan Syariah yang mencakup pengembangan sector riil dan UKM.
5. Maslahat yaitu bermanfaat dan membawa kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan.
6. Produk bervariasi mulai dari tabungan haji dan umrah, tabungan umum, giro, deposito, pembiayaan yang berbasis bagi hasil, jual beli dan sewa menyewa, sampai kepada produk jasa custodian, jasa transfer dan jasa pembayaran (*debit card, syariah charge*).
7. Fasilitas penerimaan dan penyaluran zakat, infaq, sedekah, wakaf dana kebajikan (qard), memiliki fasilitas ATM, mobile banking, *internet banking* dan inter-koneksi antar bank syariah.

Menurut PSAK No.59 (Akuntansi Perbankan Syariah) bahwa laporan keuangan Bank Syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :

- a. Neraca
- b. Laporan Laba Rugi
- c. Laporan Arus Kas
- d. Laporan Perubahan Ekuitas
- e. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat
- f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah
- g. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan
- h. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan-laporan tersebut harus diterbitkan dalam bentuk laporan korporatif yang mencakup laporan keuangan dari periode sebelumnya yang bisa dibandingkan. Metode penyajian dan pengungkapan pada laporan keuangan yang diterbitkan harus memungkinkan para pemakai untuk dapat membedakan antara perubahan sebenarnya di dalam posisi keuangan bank, hasil-hasil operasinya, cash flow-nya, investasi terbatas yang dikelola oleh bank, sumber-sumber penggunaan dan zakat dan dana sumbangan, serta sumber-sumber dan penggunaan dana qard dan perubahan akuntansinya selama periode yang dicakup oleh laporan keuangan.

Penyajian laporan keuangan tidak terlepas dari proses kegiatan operasional Bank Muamalat yang dilakukan sehari-hari dimana untuk memberikan informasi yang jelas dan wajar kepada nasabah serta khalayak umum yang membutuhkannya. Kegiatan tersebut mengharuskan Bank Muamalat mengikuti prosedur yang telah ditetapkan pihak manajemen dan panduan dari Departemen Keuangan serta perbankan Nasional juga Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kesemuanya ini dihimpun dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang menjadi dasar dari setiap pembuatan Laporan Keuangan untuk semua Bank Syariah yang ada di Indonesia.

### **3. Metode**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian deskriptif dengan tujuan adalah untuk melukiskan keadaan prosedur operasional dari bank muamalat cabang manado dalam melayani nasabah produk tabungan Shar-E dan sistem pemasukan data nasabah ke software untuk menghasilkan data keuangan yang sesuai PSAK No.59, sehingga dalam penyajian laporan keuangan pada tutup buku akhir tahun merupakan penyajian laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan serta informasi yang disajikan adalah informasi yang jelas dan wajar.

Dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan oleh penulis adalah teknik Observasi dimana penulis mendatangi objek yang akan diteliti dalam hal ini bank muamalat cabang manado, mengamati serta mencatat juga ikut membantu dalam pekerjaan karyawan untuk memastikan berjalannya prosedur operasional produk tabungan Shar-E dalam penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 59 khusus penyajian laporan keuangan bank muamalat cabang manado. Teknik selanjutnya yang penulis gunakan adalah wawancara untuk mengumpulkan data yang diperlukan tentang prosedur produk penghimpunan dana tabungan Shar-E pada bagian customer servis (cs), bagian teller dan bagian akuntansi pada bank muamalat cabang manado.

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Dimana teknik ini mengulas tentang kelancaran jalannya prosedur pelayanan produk Shar-E sampai munculnya data keuangan yang merupakan patokan dalam membuat laporan keuangan setiap akhir tahun yang berjalan sehingga dapat memastikan bahwa bank muamalat telah menjalankan ketentuan dalam PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah, serta laporan keuangan yang disajikan adalah laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan juga dapat menggambarkan keadaan bank muamalat cabang manado.

### **4. Analisis dan Evaluasi**

Shar-E adalah produk kartu bertabungan yang ditujukan bagi Pemegang Kartu yang ingin berinvestasi syariah dengan fleksibel dan akses yang luas. Shar atau shariah artinya hukum atau hukum Islam. E (ain) artinya mata, lensa yang menerima cahaya syariah untuk disebarkan ke seluruh dunia. Shar-E (bisa dibaca Syar-I) artinya sesuatu Syariah Islam bertransaksi atas dasar keikhlasan dan

Syariah. (bisa dibaca Share) yang aritnya berbagi hasil. Share-E diharapkan dapat menjadi pintu hijrah bagi umat menuju perbankan Syariah, sehingga asset umat dapat disalurkan kembali untuk sebesar-besarnya produktifitas umat.

Kehidupan bisnis perbankan Syariah sangat ditentukan berjalantidaknya produk-produk yang dijual kepada nasabah. Kesemuanya ini sangat dipengaruhi oleh situasi prosedur produk yang dikembangkan dan dijalankan. Di dalam prosedur operasional produk Bank Muamalat dibedakan menjadi dua kelompok umum, yaitu :

1. Prosedur Produk Penghimpunan / Pengerahan Dana terdiri dari:
  - a. Produk Tabungan : Shar-E, Ummat dan Arafah
  - b. Produk Deposito : Mudharabah dan Fulinvest
  - c. Produk Giro : Wadiah
  - d. DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) Muamalat
  
2. Prosedur Produk Penanaman / Penyaluran Dana terdiri dari :
  - a. Konsep Jual Beli
    - a) *Murabahah* adalah jual beli barang sesuai harga asal yang ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian.
    - b) *Salam* adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari dimana pembayaran dilakukan di muka, tunai.
    - c) *Istishna'* adalah jual beli barang dimana produsen ditugaskan untuk membuat suatu barang pesanan dari pemesan.
  - b. Konsep Bagi Hasil
  - c. Konsep Sewa
3. Prosedur Menjadi Nasabah Share-E
 

Untuk menjadi nasabah Produk Tabungan Share-E terdiri dari dua cara yaitu:

  - 3.1 Prosedur pertama Pembukaan Rekening melalui *Kantor Cabang bank Muamalat Tbk Manado*, sebagai berikut :
    - 3.1.1 Calon Pemegang Kartu membeli paket perdana dengan harga sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu) perpaket;
    - 3.1.2 Persediaan paket perdana Share-E disimpan dan deregister oleh Customer Service Cabang;
    - 3.1.3 Paket perdana Share-E harus disimpan dalam khasanah utama;
    - 3.1.4 Customer Service Cabang wajib memandu calon Pemegang Kartu untuk mengisi Formulir Aplikasi Share-E dan slip Transper secara lengkap;
    - 3.1.5 Dokumen pendukung yang diperlukan untuk pembelian paket perdana adalah foto kopi identitas diri (KTP dan SIM);
    - 3.1.6 Dalam hal calon pemegang kartu belum cakap hukum, maka harus disertakan data orang tua/ wali disertai dengan foto copy identitas diri orang tua/wali;
    - 3.1.7 Pembelian Paket Perdana melalui Teller tidak dapat dibatalkan. Calon Pemegang Kartu membayar uang pembelian paket perdana melalui Teller

dengan menggunakan Aplikasi Transfer dengan cara pengisian sebagai berikut:

- a. Pada kolom penerima/beneficiary diisikan nama calon pemegang kartu.
  - b. Pada kolom jumlah transaksi diisikan nominal sebesar Rp. 100.000.
  - c. Pada kolom biaya diisikan nominal sebesar Rp. 25.000.
- 3.1.8 Fungsi yang digunakan untuk melakukan pembelian Share-E di Teller adalah Modul Pembelian Paket perdana Shar-E yang terdapat pada Modul Input Transaksi Teller;
  - 3.1.9 Kartu tidak diperkenankan untuk diberikan kepada calon pembeli sebelum data pembelian diinput oleh Teller ke dalam system pembelian paket perdana;
  - 3.1.10 Saldo awal Share-E sebesar Rp. 100.000 secara system akan dikreditkan ke rekening penabung setelah diotorisasi oleh supervisor Teller yang melakukan pengimputan data pembelian;
  - 3.1.11 Penjualan Share-E melalui Dai Muamalat akan diatur dalam ketentuan sendiri;
  - 3.1.12 Customer Service Cabang harus mengadministrasikan data pemegang kartu pada system kiblat dengan cara melakukan ubah data pemegang kartu pada Modul Base-Pemeliharaan;
  - 3.1.13 Nomor Base nasabah pemegang Kartu Share-E dapat diketahui dari data pemegang rekening pada Modul Girtab-Peragaan;
  - 3.1.14 Cabang harus mengirimkan rekapitulasi data penjualan paket perdana kepada VBOD paling lambat pada pukul 10.00 pada hari kerja berikut dalam bentuk file text dengan nama : nocabregmmdyy.tx. contoh:101reg23082004;
  - 3.1.15 Data penjualan paket perdana yang diperlukan oleh VBOD adalah :
 

Nomor Kartu Share-E	:
Nama Pemegang Kartu	:
Alamat	:
Total Penjualan (item ataupun jumlah dana)	:
  - 3.1.16 Pada hari kerja berikutnya Cabang harus mengirimkan seluruh dokumen penjualan (Formulir Aplikasi Share-E dan foto kopi identitas diri) kepada VBOD (Virtual Business Operation Department) bank Muamalat KPNO
  - 3.2 Prosedur kedua untuk Pembukaan Rekening melalui *Kantor* Cabang Manado, sebagai berikut :
    - 3.2.1 Calon Pemegang Kartu membeli paket perdana dengan harga sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu) per paket;
    - 3.2.2 Persediaan paket perdana Share-E disimpan dan deregister oleh Customer Service Cabang;
    - 3.2.3 Dokumen pendukung yang diperlukan untuk pembelian paket perdana adalah foto kopi identitas diri (KTP dan SIM);
    - 3.2.4 Dalam hal calon pemegang kartu belum cakap hukum, maka harus disertakan data orang tua/ wali disertai dengan foto copy identitas diri orang tua/wali;

- 3.2.5 Pemegang kartu tidak dapat membatalkan Pembelian paket perdana melalui system SOPP POS;
- 3.2.6 Setoran awal nasabah sebesar Rp. 100.000 akan efektif langsung di rekening nasabah pada hari pembelian Share-E;
- 3.2.7 Dana hasil penjualan paket perdana ditujukan ke rekening giro Bank Muamalat di PT. Pos Indonesia dengan No. Rekening : A. 13.910 dan Atas Nama : PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk serta jumlah dana yang disetor adalah sebesar harga jual setelah dipotong imbal jasa;
- 3.2.8 Terhadap setiap kartu yang terjual PT Pos Indonesia memperoleh imbal jasa sebesar Rp. 7.000 dengan perincian :
  - a. Rp. 4.000 untuk imbal jasa penjualan
  - b. Rp. 3.000 untuk imbal jasa pemanfaatan SOPP
- 3.2.9 Imbal jasa tersebut akan didebet langsung dari Rekening Giro Share-E di PT. Pos Indonesia dengan nomor rekening seperti pada butir di atas;
- 3.2.10 Pusat rekonsiliasi Data PT. Pos Indonesia akan mengirimkan rekapitulasi data penjualan paket perdana kepada Bank Muamalat paling lambat pada pukul 10.00 hari kerja berikutnya dalam bentuk file text dengan nama : regmddy.txt;
- 3.2.11 Data penjualan paket perdana yang diperlukan oleh Bank Muamalat adalah:
  - a. Nomor Referensi
  - b. Nomor Kartu Share-E Muamalat
  - c. Nama Pemegang Kartu
  - d. Alamat
  - e. Nomor telepon
  - f. Nama Kecil Ibu Kandung
  - g. Nomor KTP
  - h. Jumlah Uang
  - i. Tanggal Input
  - j. Nama UPT
- 3.2.12 Pada hari kerja berikutnya kantor pos harus mengirimkan seluruh dokumen penjualan (formulir pembelian paket perdana dan foto kopi identitas diri) ke PO BOX Khusus MUAMALAT;
- 3.2.13 Setiap akhir bulan Unit Bisnis Ritel PT. Pos Indonesia membuat laporan hasil penjualan kartu Share-E ke Bank Muamalat dengan data sebagai berikut:
  - a. Nomor Kartu
  - b. Tanggal Penjualan
  - c. KPRK Penjual

Dalam hal ini, penulis melihat bahwa Shar-E merupakan kartu bertabungan yang memiliki keistimewaan tersendiri karena di dalam satu kartu sudah mencakup banyak fungsi seperti menabung (tanpa buku), ATM, Kartu Debit yang dapat digunakan untuk berbelanja atau membayar tagihan telepon, listrik juga untuk mengisi pulsa handphone.

#### 4. Prosedur Penutupan Rekening shar-E

Dalam melakukan penutupan rekening Shar-E, nasabah dapat mendatangi Kantor Cabang Bank Muamalat atau Kantor Pos terdekat atau Outlet yang sudah disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 4.1 Penutupan rekening dengan saldo sampai dengan Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan cara penarikan tunai langsung melalui ATM;
  - 4.2 Jika saldo rekening berjumlah di atas Rp. 10.000,000,- (sepuluh juta rupiah) datang ke Counter SOPP Pos terdekat tem[at membeli Shar-E;
  - 4.3 Mengisi formulir layanan Shar-E kepada petugas dan isi kemudian dikirimkan formulir tersebut ke Bank Muamalat Cabang Manado melalui SOPP Pos terdekat dengan melampirkan :
    - a. Formulir layanan Shar-E
    - b. Fotocopy identitas diri yang masih berlaku
    - c. Kartu ATM yang telah digunting
  - 4.4 Melakukan pemindahbukuan saldo rekening penutupan Shar-E dengan nomor rekening 301.00042.12 melalui SALAM MUAMALAT;
  - 4.5 Permohonan akan segera diproses lebih lanjut dan Bank Muamalat akan mengirimkan surat konfirmasi atas penutupan rekening. Keistimewaan menggunakan kartu Shar-E pada saat penutupan rekening, seluruh dana yang ada dapat ditarik seluruhnya hingga saldo nihil (Rp.0).
5. Deskripsi Fisik Shar-E

Untuk mendapat gambaran tentang kartu Shar-E sebagai bukti fisik bagi nasabah berikut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Lama



Baru

Kartu Shar-E di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 5.1 Terdiri dari 16 digit nomor kartu Shar-E yang akan diminta pada saat melakukan transaksi melalui SALAMMUAMALAT.  
Contoh : No kartu 601923 900 0000199
  - 5.2 Ada 10 digit nomor rekening yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas pengisian dana rekening Shar-E baik melalui secara tunai, pemindahbukuan antar rekening di Bank Muamalat maupun transfer dari bank lain.  
Contoh : Nomor Rekening 900 0000199
  - 5.3 Nomor urut kartu (*sequence number*) adalah nomor urut pencetakan kartu yang akan diminta pada saat melakukan transaksi melalui SALAM MUAMALAT.
6. Prosedur Penyajian Laporan Keuangan
- Dalam menyajikan laporan keuangan, Bank Muamalat di dukung oleh system *komputerisasi on line* yang sudah deprogram oleh kantor pusat Bank

Muamalat yang berkedudukan di Jakarta. Tidak ketinggalan pula karyawan yang bekerja di bagian Akuntansi direkrut berdasarkan disiplin ilmu Akuntansi. Jadi untuk menghasilkan Data Keuangan yang nantinya diperuntukkan dalam pembuatan Laporan Keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 59 (Akuntansi Perbankan Syariah) hanya memasukkan data ke software yang sudah ada dan sudah diprogram sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam PSAK No. 59 tersebut.

Prosedur yang diterapkan oleh Bank Muamalat Cabang Manado dalam menyajikan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut (keadaan pada proses pembukuan produk tabungan Shar-E) :

- 6.1 Pengisian Data Nasabah dengan mengisi lembar yang sudah disediakan dan melengkapi dengan copyan Id Card nasabah pada bagian Customer Service. Formulir Aplikasi Shar-E terdiri dari rangkap 3 (tiga) dimana lembar 1 (satu) untuk Bank Muamalat, lembar 2 (dua) untuk PT. Pos jika membuka rekening di Kantor Pos, dan lembar 3 (tiga) untuk nasabah.
- 6.2 Membeli shar-E dengan harga Rp. 125.000 dan berisi saldo dalam rekening Rp. 100.000 pada saat pembukaan rekening Shar-E di bagian Teller. Slip setoran mempunyai rangkap 3 (tiga) terdiri dari lembar 1 (satu) untuk Tiket Kredit, lembar 2 (dua) untuk copy Teller, dan lembar 3 (tiga) untuk nasabah.
- 6.3 Menambah jumlah tabungan dengan menyetor sejumlah uang tunai menggunakan slip setoran tunai di kantor cabang Bank Muamalat pada bagian Teller.
- 6.4 Kartu Shar-E dan kelengkapannya.
- 6.5 Data keuangan yang sudah diinput pada bagian teller tadi menggunakan *Program Kiblat* untuk Bank Muamalat diseluruh Indonesia.
- 6.6 Bagian Akuntansi menyelenggarakan kegiatan penjurnalan lewat computer dengan menyang sudah ada untuk jenis biaya yang immaterial, contoh : Pengadaan Materai, Biaya Materai Nasabah, Pembelian Komputer, Biaya Perbaikan Komputer, Biaya Listrik dan air.
- 6.7 Data keuangan yang sudah diinput selama satu tahun akan diterima oleh Kantor Pusat Bank Muamalat yang berkedudukan di Jakarta. Data keuangan tersebut akan menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan pada saat akhir tahun.
- 6.8 Laporan keuangan yang sudah selesai akan diperiksa oleh manajemen untuk nantinya diperiksa kembali oleh Auditor Independen yang sudah ditunjuk Bank Muamalat
- 6.9 Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Auditor Independen itu akan disajikan oleh Manajemen untuk nasabah atau umum yang ingin mengetahui serta memerlukan informasi yang berhubungan dengan kegiatan Bank Muamalat selama satu periode berjalan.
- 6.10 Laporan keuangan yang disajikan biasanya menampilkan laporan keuangan tahun sebelumnya sebagai pembandingan dan merupakan kumpulan dari semua cabang Bank Muamalat yang ada di Indonesia.

Transaksi yang terjadi dalam kegiatan Bank Muamalat Cabang Manado semuanya diinput melalui computer dengan menggunakan program KIBLAT. Dalam program tersebut, transaksi secara otomatis dipisahkan menurut pos-pos



yang nantinya pada hasil akhir setiap tutup buku tahunan akan menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan Bank Muamalat Cabang Manado adalah kumpulan transaksi yang dihasilkan oleh seluruh Bank Muamalat yang ada di Indonesia.

Laporan keuangan Bank Muamalat mencerminkan tata kelola perusahaan secara Islami dan sesuai dengan praktek terbaik yang berlaku di Perbankan Nasional dan Internasional yang tidak terlepas dari Peraturan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah. Untuk melihat lebih rinci hasil dari laporan manajemen tentang kegiatan usaha Bank Muamalat selama tahun 2013 dengan pembandingan tahun 2012, penulis mengutip dari buku laporan tahunan yang diterbitkan oleh BMI dan dapat dilihat pada *lampiran*.

Dari hasil penelitian ini penulis mengambil analisa sebagai berikut:

1. Prosedur yang diterapkan pada Bank Muamalat dalam hal penghimpunan dana tabungan khususnya produk tabungan Shar-E yang bersifat Mudharabah sudah sesuai dengan PSAK No. 59 dimana dalam hal pengakuan dan pengukuran yang bersifat Mudharabah yakni akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dalam hal ini Bank Muamalat cabang Manado, ditentukan berdasarkan nisbah bagi hasil. Pada saat pembukaan tabungan Shar-E, jumlah bagi hasil sudah ditentukan terlebih dahulu berdasarkan nisbahnya.
2. Dalam menyajikan laporan keuangan, Shar-E yang merupakan produk tabungan sebagai penghimpun dana, disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat. Tabungan Shar-E dari Bank Muamalat ini termasuk dalam jenis *mudharabah muthalaqah* (investasi tidak terikat) dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan menurut PSAK No.59, dimana Mudharabah terdiri dari dua jenis yaitu *mudharabah muthalaqah* (investasi tidak terikat) dan *Mudharabah Muqayyadah* (investasi terikat). Apabila bank bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima :
  - a. Dalam *Mudharabah Muqayyadah* disajikan dalam laporan perubahan investasi terikat sebagai investasi terikat dari nasabah
  - b. Dalam *Mudharabah Mutlaqah* disajikan dalam neraca sebagai investasi tidak terikat.
3. Dalam hal laporan keuangan Bank Muamalat, terdiri dari :
  - a. Neraca
  - b. Laporan Laba Rugi
  - c. Laporan Arus Kas
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas
  - e. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat
  - f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah
  - g. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Qardhul Hasan
  - h. Catatan Atas Laporan Keuangan

Hal ini sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah poin 152 penyajian.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pengamatan dan keikutsertaan dalam kegiatan Operasional Penghimpunan Dana Tabungan Shar-E serta dihubungkan dengan judul yakni prosedur pemeriksaan atas produk penghimpunan dana tabungan sebagai evaluasi penerapan PSAK No. 59 (Akuntansi Perbankan Syariah) pada Bank Muamalat Cabang Manado, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Shar-E merupakan salah satu produk tabungan tanpa buku dari Bank Muamalat yang penghimpunan dananya dari nasabah dan memiliki keistimewaan tersendiri dengan karakteristik yang melekat padanya.
2. Bagian yang terlibat dalam proses penghimpunan dana tabungan shar-E adalah CS (Customer Service) dan bagian Teller dengan *komputerisasi system kiblata* untuk kemudian bagian Akuntansi menyelesaikannya agar laporan keuangan dapat dikeluarkan oleh kantor pusat setiap periode berjalan.
3. Setiap pembukaan rekening Shar-E berhubungan dengan penghimpunan dana, harus disertai prosedur pengisian data nasabah dan melampirkan Kartu Identitas Diri (Id Card) yang masih berlaku.
4. Kartu Shar-E yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Tbk, Cabang Manado sudah mengalami perubahan tampilan dan kartu yang lama masih tetap bisa digunakan.
5. Setelah menelusuri system Akuntansi pada Bank Muamalat Cabang Manado yang berhubungan dengan prosedur penghimpunan Dana tabungan Shar-E menunjukkan bahwa Bank Muamalat Cabang Manado melaksanakan aturan yang terdapat dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah secara Teoritis.
6. laporan Keuangan Bank Muamalat Cabang Manado merupakan kumpulan Data Keuangan yang diinput melalui Komputerisasi Sistem Kiblata dan dilaksanakan oleh semua Kantor Cabang yang berada di Indonesia dan disajikan secara wajar.
7. Keuntungan dan kerugian yang terjadi pada Bank Muamalat adalah menjadi tanggung jawab bersama semua nasabah Bank Muamalat. Jika Bank Muamalat mendapat keuntungan maka nasabah juga mendapat keuntungan dengan menerima *Bagi Hasil* sesuai dengan *Nisbah* yang telah disepakati saat pembukaan Rekening di Bank Muamalat. Jadi, dalam hal berbisnis dengan Bank Syariah maka setiap keuntungan dan kerugian yang dialami akan ditanggung bersama sesuai dengan *akad* yang telah disepakati bersama.

### **B. Implikasi**

Dalam hal keterbatasan penelitian ini, penulis mengalami kendala dalam beberapa hal dimana sejak penelitian pertama hingga penelitian terakhir ini, terjadi beberapa kebijakan pimpinan mengenai akses untuk melakukan pengamatan secara langsung dalam pelaksanaan input data setelah melalui *Customer Service* (CS). Hal ini disebabkan karena keterbatasan ruangan dan kenyamanan karyawan dalam melaksanakan tugasnya serta *privacy* dari unit akuntansi itu sendiri. Keadaan yang demikian itu sangat penulis hargai sehingga pengamatan yang penulis lakukan hanya sebatas yang diizinkan oleh pimpinan.

### C. Saran

Berdasarkan observasi yang dilakukan, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk menghimpun dana Tabungan Shar-E, sebaiknya promosi Bank Muamalat lebih ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih mengenal Profil dari Bank Muamalat yang merupakan Bank Syariah yang dapat menjawab pilihan masyarakat muslim dimana umat muslim masih meragukan keberadaan Bank Konvensional karena alasan *Riba* yang bagi Umat Muslim hukum Syariatnya adalah *Haram*
2. Merekrut karyawan dari disiplin ilmu yang kompeten dengan perbankan Syariah agar mutu Pelayanan dan Kader manajemen dapat terus dipertahankan sebagai Bank Murni berbasis syariah.
3. Fleksibel dalam melaksanakan pekerjaan disemua bagian tanpa harus terganggu atau merasa diawasi jika ada yang ingin melakukan penelitian di Bank Muamalat.
4. Pemberian penghargaan bagi yang memiliki kinerja maksimal dan hukuman bagi yang memiliki kinerja minimal.

### Daftar Pustaka

- Adnan, M. Akhyar ; Akuntansi Syariah : Arah, Prospek dan Tantangannya: Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Arifin, Zainul : Pengantar, M. Syafii Antonio : Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah: Jakarta, Alvabet, cet ke 2, Agustus 2003.
- Ikatan Akuntan Indonesia; Standar Akuntansi Keuangan; Salemba Empat, per 1 Oktober 2004
- Buletin Laporan Tahunan BMI tahun 2006, h. 1.
- Buletin Laporan Tahunan BMI tahun 2006, h. 7.
- Muhammad; Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah; Yogyakarta UII Press, 2000
- Mohammad Ariff, islamic banking. Asian-pacific economic literature, vol 2, No. 2 (september 1988), h. 52
- Muh. Zuhri, Riba dalam Al Qur'an dan Masalah Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1996, h. 159
- Sumitro, Warkum; Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait BMI dan Takaful di Indonesia; PT.Raja Grafindo Persada,2002.
- Syafi'I Antonia, Muhammad; Bank Syariah; Dari Teori ke Praktik; Gema Insani Press, 2001.
- Triyuwono, Iwan; Perspektif, metodologi dan Teori Akuntansi Syariah; PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Zulkifli, Sunarto; Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah; Zikrul Hakim, 2003.

### Lampiran

Laporan Keuangan Bank Muamalat, Tbk tahun 2013 dengan pembandingan tahun 2012.

## **Pengaruh Struktur Kepemilikan, Likuiditas Dan *Leverage* Terhadap *Financial Distress***

Novi S. Budiarmo  
(Email: novi\_sbudiarmo@yahoo.com)

### ***Abstract***

*The purpose of this study was to determine the variables that contribute to financial distress at the manufacturing company. Another aim is to conclusion the solution for the financial distress, relation to the variable-variable: institutional ownership, liquidity and leverage.*

*This study uses secondary data obtained from Indonesia Stock Exchange (BEI). During period 2010 to 2011. Data used in this study include financial ratios and ownership structure ratio. The statistical methods used to test the hypothesis is logit model.*

*The results of this study indicate that variable institutional ownership have a significant positif to financial distress, liquidity have a significant negative to financial distress, while leverage have no significant effect to financial distress*

*Keywords: Financial distress, Leverage, Liquidity*

### **1. Latar Belakang**

Berdasarkan *trade off theory*, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan dengan menaikkan tingkat utang melalui manfaat pajak, karena biaya bunga merupakan biaya pengurangan pajak. Namun jika perusahaan menaikkan tingkat utang diatas titik tertentu maka tingkat *financial distress* akan mulai meningkat dan biaya yang berhubungan dengan utang tidak akan lagi menjadi keuntungan bagi perusahaan.

Faktor-faktor lainnya yang merupakan pemicu tingkat risiko seperti keadaan ekonomi yang tidak menentu dan makin meningkatnya lingkungan persaingan menyebabkan perusahaan-perusahaan yang tidak beradaptasi dengan faktor-faktor ini akan mengalami *financial distress*. Apabila hal ini dibiarkan, maka perusahaan akan mengalami kebangkrutan.

Terdapat perbedaan definisi antara kebangkrutan dan *financial distress* menurut Platt dan Platt (2006). *Financial distress* adalah keadaan dimana tiga faktor sebagai berikut terpenuhi yaitu negative EBITDA, negatif EBIT dan negative net income. Masih kurang jelas saat dimulainya atau berakhirnya *financial distress*. Sebelumnya Platt dan Platt (2002) mendefinisikan *financial distress* merupakan suatu kondisi dimana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau sedang krisis. Atau dengan kata lain *financial distress* merupakan suatu kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Disamping itu terdapat berbagai tingkatan atas *financial distress*. Hal ini yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian sehubungan dengan pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi *financial distress* baik dari segi struktur kepemilikan maupun keuangan. Hal ini penting untuk melakukan prediksi kelangsungan hidup perusahaan.

Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan, apakah struktur kepemilikan, likuiditas dan leverage memberikan kontribusi terhadap kemungkinan terjadinya *financial distress*? Dan apakah berdampak terhadap solusi *financial distress*?

## 2. Tinjauan Pustaka

Financial distress adalah suatu kondisi dimana perusahaan menghadapi masalah kesulitan keuangan. Menurut Platt dan Platt (2002), financial distress didefinisikan sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Menurut Wurck (1990) *financial distress* adalah suatu keadaan dimana arus kas operasi tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban-kewajiban lancarnya seperti hutang dagang atau biaya bunga (Alyabel, 2002).

Beberapa penelitian tentang kebangkrutan dengan fokus pada penggunaan rasio keuangan sebagai prediktor *financial distress*. Altman (1968) menggunakan Z score sebagai alat untuk memprediksi probabilitas bankruptcy. Ohlson (1980), Zmijewski (1984) dan Lau (1987) menggunakan model prediksi yang sama tapi dengan rasio keuangan yang berbeda.

Dengan adanya kepemilikan institusional, investor cenderung akan lebih percaya terhadap perusahaan tersebut dan hal ini menjadi nilai tambah tersendiri bagi perusahaan tersebut. Schleifer dan Vishny (1986). Hasil penelitian Crutchley (1999) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *financial distress* perusahaan. Hal ini berarti bahwa peningkatan kepemilikan institusional dalam perusahaan akan mendorong semakin kecilnya potensi kesulitan keuangan. Keadaan tersebut disebabkan semakin besar kepemilikan institusional akan semakin besar monitor yang dilakukan terhadap perusahaan yang pada akhirnya akan mampu mendorong semakin kecilnya potensi kesulitan keuangan yang mungkin terjadi di dalam perusahaan.

Fan et al (2013) menyajikan bukti bahwa perilaku *financial distress* berhubungan dengan faktor institusional eksternal. Lingkungan institusional seperti struktur kepemilikan dan kualitas pemerintah, sangat mempengaruhi keputusan atas distress perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan dan perusahaan dengan efektivitas yang lemah menunjukkan kinerja dan operasional yang buruk.

Rus et al (2013) yang melakukan penelitian hubungan struktur kepemilikan dengan *financial distress*, menyatakan bahwa kepemilikan oleh Government linked investment companies tidak memiliki hubungan yang signifikan dalam menjelaskan *financial distress*. Sedangkan kepemilikan non government linked investment companies secara signifikan positif berhubungan dengan *financial distress*. Sedangkan Domestic Private Institutional Investor (DPIIs) memiliki hubungan signifikan positif terhadap financial distress. Penelitian ini beranggapan bahwa hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi kepemilikan oleh institusional privat semakin rendah *financial distress* karena peranan sebagai agen yang berfungsi untuk melakukan monitoring.

Penelitian tentang identifikasi *financial distress* perusahaan yang dilakukan oleh Khaliq et al (2014) menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara current ratio dan debt ratio terhadap Z-Scores yang mendeterminasikan *financial distress* atas Government Linked Companies (GLC). Keuangan negara yang tidak sehat akan menjadi penyebab distress jangka panjang dimana akan mengakibatkan pembatasan atas aktivitas investasi, arus modal dan kinerja perusahaan.

John (1993), melakukan penelitian terhadap hubungan antara likuiditas dengan proksi dari biaya *financial distress* seperti Tobin's  $q$ , R&D dan biaya iklan, dan probabilitas kebangkrutan. John menyatakan terdapat hubungan positif antara likuiditas dan *financial distress costs*. Selain itu hasil penelitian menyatakan hubungan negatif antara *leverage* dan *financial distress costs*, di mana utang diukur dengan total utang dan total utang jangka panjang.

Opler dan Titman (2012) menyatakan bahwa perusahaan dengan *leverage* yang tinggi kehilangan pangsa pasar secara substansial dalam kompetisi keuangan. Selanjutnya dikatakan bahwa hal ini sejalan dengan pandangan bahwa biaya tidak langsung dari *financial distress* adalah signifikan dan positif. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi sehubungan dengan *Research and Development* adalah subjek yang paling mengalami distress secara ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Jiming dan Wei Wei (2011) menunjukkan bahwa *leverage (debt asset ratio)* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi *financial distress*. Sehingga ini berarti semakin besar kegiatan perusahaan yang dibiayai oleh utang semakin besar pula kemungkinan terjadinya kondisi *financial distress*, akibat semakin besar kewajiban perusahaan untuk membayar utang tersebut. Hasil yang sama juga ditunjukkan dalam penelitian Ong, et al. (2011) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kondisi *financial distress*.

Pranowo et al (2010), menguji *financial distress* dengan membagi status kondisi keuangan, proses dari *financial distress* perusahaan secara integral ke dalam empat tahap yaitu: good, early impairment, deterioration and cash flow problem companies. Hasil penelitian menunjukkan bahwa current ratio, efisiensi, modal dan variable dummy dari status kondisi keuangan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap *Debt Service Coverage (DSC)* sebagai proksi dari *financial distress*. Sedangkan *leverage* memiliki hubungan negative dan signifikan dengan DSC. Faktor yang lain yaitu profit, laba ditahan, *Good corporate Governance* dan makroekonomi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *financial distress*.

Baimwera and Muriuki (2014), dalam penelitiannya menyatakan bahwa berdasarkan analisis univariate dan multivariate guna menguji *financial distress* perusahaan, likuiditas dan *leverage* memiliki hubungan tidak signifikan dalam mendeterminasikan *financial distress* perusahaan. Dilain pihak pertumbuhan dan profitabilitas memiliki hubungan yang signifikan dengan *financial distress*.

### 3. Hipotesis dan Model

Perumusan hipotesis penelitian ini

Ha<sub>1</sub> : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap *financial distress*.

Ha<sub>2</sub> : Likuiditas berpengaruh signifikan negatif terhadap *financial distress*.

Ha<sub>3</sub> : *Leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap *financial distress*.

#### 4. Metode Penelitian

##### 4.1. Data

Populasi dan Sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di PT. Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* atau sampel bertujuan dengan kriteria tertentu. Kriteria penarikan sampel yang diterapkan adalah :

1. Perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2010 - 2011.
2. Semua perusahaan manufaktur sektor *agriculture, mining, basic industry* dan *chemicals*
3. Perusahaan yang memiliki data laporan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2010-2011 dan data pendukung lain yang lengkap.

##### 4.2. Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel dependen adalah *financial distress* yang merupakan variabel dikotomi (*dichotomous dependent variables*). *Financial distress* didefinisikan sebagai perusahaan yang memiliki *Earning Before Interest and Tax* (EBIT) negatif. Dalam penelitian ini variabel dependen disajikan dalam bentuk variabel dummy dengan ukuran binomial, yaitu nilai satu (1) apabila perusahaan memiliki EBIT positif dan nol (0) apabila perusahaan memiliki EBIT negatif. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, likuiditas dan *leverage*. Pengukuran variabel independen dan dependen menggunakan proksi sebagai berikut :

1. Kepemilikan Institusional adalah pemegang saham berbentuk instansi/pemerintah yang tidak aktif dalam kegiatan operasional perusahaan. Kepemilikan institusional diformulasi sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan institusional} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki } \textit{institusional}}{\text{Jumlah saham beredar}} \times 100\%$$

2. Likuiditas, rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah *current ratio* yang merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancarnya

$$\text{Liquidity} = \frac{\text{Current Asset}}{\text{Current Liabilities}}$$

3. *Leverage* adalah tingkat sampai sejauh mana hutang digunakan dalam struktur modal suatu perusahaan.

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Long Term Debt}}{\text{Total Asset}}$$

#### 4.3. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah regresi logistik (*Logistic Regression*), dimana variabel bebasnya merupakan kombinasi antara metric dan non metric (nominal). Regresi logistik adalah regresi yang digunakan untuk menguji apakah probabilitas terjadinya variabel terikat dapat diprediksi dengan variabel bebasnya. Teknik analisis ini tidak memerlukan uji normalitas, heterokedastisitas, dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya (Ghozali, 2006).

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel binary, yaitu apakah perusahaan tersebut mengalami kondisi *financial distress* atau tidak. Variabel independen yang digunakan dalam model ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, likuiditas, dan *leverage*.

Metode analisis yang digunakan adalah *Logit Regression Model*. Menurut Maddala (1991) model *logit regression* tepat digunakan untuk kasus penyampelan dari dua populasi, yaitu perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan. Secara lengkap model tersebut dirumuskan sebagai berikut :

$$\ln \left( \frac{p}{1-p} \right) = \text{DISTRESSED}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{ Institutional} + \beta_2 \text{ Liquidity} + \beta_3 \text{ Leverage} + \varepsilon$$

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan hasil uji nilai signifikan  $t$  ( $\text{Sig } t$ ) dengan  $\alpha$ . Adapun kriterianya adalah jika nilai  $\text{sig} > \alpha$  (0.05) maka  $H_0$  diterima, jika nilai  $\text{sig} < \alpha$  (0.05) maka  $H_0$  ditolak.

## 5. Hasil Analisis dan Pembahasan

### 5.1. Hasil Analisis

Langkah pertama yang dilakukan ialah mengelompokan data perusahaan yang mengalami *financial distress* dan sehat. Lalu menghitung variabel independen, dan dependen. Dalam hal ini variable dependennya adalah *financial distress*, variabel independennya adalah Kepemilikan institusional, likuiditas dan *leverage*. Setelah itu melakukan pengujian secara statistik dengan uji kesesuaian model kemudian uji multikolinieritas dan uji hipotesis (uji Wald), dan yang terakhir adalah uji ketepatan model.

Terdapat 3 (tiga) cara penilaian kesesuaian model regresi logistik dengan data yang ada. Ketiga cara tersebut menurut Ghozali (2009) yaitu dengan melihat penurunan nilai statistik  $-2 \text{ Log Likelihood}$ , kenaikan nilai  $R^2$  Cox dan Snell/nilai  $R^2$  Nagelkerke, dan nilai probabilitas dari statistik Hosmer-Lemeshow.

Nilai  $-2 \text{ Log Likelihood Ratio}$  dengan melihat penurunan nilai statistik  $-2 \text{ Log Likelihood}$ . Penurunan nilai  $-2 \text{ Log Likelihood}$  yang dimaksudkan adalah penurunan nilai sebelum dan setelah adanya variabel bebas dalam model.



Selanjutnya selisih nilai  $-2 \text{ Log Likelihood}$  ini dibandingkan dengan nilai  $\chi^2$ . Tabel dengan selisih derajat kebebasan/*degree of freedom* (df). Derajat kebebasan yang dimaksudkan yaitu derajat kebebasan setelah penambahan variabel bebas (df2)<sup>7</sup> dan derajat kebebasan sebelum adanya penambahan variabel bebas (df1)<sup>8</sup>. Apabila nilai selisih statistik  $-2 \text{ Log Likelihood}$  lebih besar daripada  $\chi^2$  tabel, maka dapat dikatakan penurunan nilai statistik  $-2 \text{ Log Likelihood}$  signifikan, artinya penambahan variabel bebas ke dalam model memperbaiki kesesuaian model, Ghozali (2009).

Koefisien Cox dan Snell Square dan Nagelkerke R Square Cox dan Snell's R Square merupakan ukuran yang hampir sama dengan  $R^2$  pada multiple regression yang didasarkan pada estimasi *likelihood* dengan nilai maksimum kurang dari 1 (satu) sehingga sulit diinterpretasikan. Nagelkerke's  $R^2$  merupakan modifikasi dari koefisien Cox dan Snell untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu). Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai Cox dan Snell R dengan nilai maksimumnya, Ghozali (2009).

Hosmer dan Lemeshow's *Goodness of Fit Tests*, keputusan penolakan atau penerimaan hipotesis dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%. Hosmer and Lemeshow's *Goodness of Fit Tests* menguji hipotesis nol bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit. Menurut Ghozali (2009), *goodness of fit test* dapat dilakukan dengan memperhatikan output dari Hosmer and Lemeshow's *Goodness of fit test*, dengan hipotesis:

H0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data

HA : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data

Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow sama dengan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga *goodness fit model* tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya.

Tabel klasifikasi 2x2 menghitung nilai estimasi yang benar (correct) dan salah (incorrect). Pada kolom merupakan dua nilai prediksi dari variabel dependen dalam hal ini perusahaan sehat (1) dan perusahaan tidak sehat (0), sedangkan pada baris menunjukkan menunjukkan nilai observasi sesungguhnya dari variabel dependen. Pada model sempurna, maka semua kasus akan berada pada diagonal dengan ketepatan peramalan 100% (Ghozali, 2005).

Pengujian signifikansi dari koefisien regresi pada regresi logistik digunakan uji Wald untuk menguji signifikansi konstanta dari setiap variabel independen yang masuk ke dalam model. Oleh karena itu, apabila uji wald terlihat angka signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka koefisien regresi adalah signifikan pada tingkat kepercayaan 5%. Dengan uji Wald, kita dapat mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap kemungkinan perusahaan berada pada kondisi *financial distress*.

## 5.2. Pembahasan

### 5.2.1. Deskripsi Sampel Penelitian

**Tabel 5.1**  
**Deskripsi Sampel Penelitian**

	Jumlah	Persen
Sehat	146	0,80
Distress	36	0.20
Total	182	100

Berdasarkan kriteria-kriteria sampel yang telah ditetapkan maka diperoleh total sampel sebesar 182 perusahaan (lihat tabel 5.1.). 146 perusahaan masuk dalam kategori sehat dan 36 perusahaan dalam kategori distress.

### 5.2.2. Penilaian Kesesuaian Model (*model fit test*)

**Tabel 5.2**  
**. -2 Log Likelihood Step**

<i>Iteration</i>		<i>Coefficients</i>	
		<i>-2 Log likelihood</i>	<i>Constant</i>
<i>Step 0</i>	1	182.130	1.209
	2	181.035	1.390
	3	181.032	1.400
	4	181.032	1.400
<i>Step 1</i>	1	164.554	1.460
	2	158.650	1.705
	3	157.673	1.726
	4	157.589	1.726
	5	157.588	1.726
	6	157.588	1.726

Hasil pada tabel 5.2 menunjukkan nilai -2 Log likelihood block number = 0 adalah 182.130 dan -2 Log likelihood block number = 1 adalah 157.588. Penurunan ini menunjukkan model regresi logistik yang lebih baik. Dapat disimpulkan bahwa penambahan variable kepemilikan institusional, likuiditas dan *leverage* ke dalam model, memperbaiki model fit regresi logistik.

**Tabel 5.3**  
***Omnibus Tests of Model Coefficients***

		<i>Chi-square</i>	<i>df</i>	<i>Sig.</i>
<i>Step 1</i>	<i>Step</i>	55.265	4	0.000
	<i>Block</i>	55.265	4	0.000
	<i>Model</i>	55.265	4	0.000

Nilai *Goodness of Fit Test* dilihat dari uji Chi Square yang mempunyai nilai 55.265, dengan  $df = 4$ , (lihat table 5.3). Hasil tersebut berarti model regresi logistik layak dipakai untuk analisis selanjutnya. Hasil Chi Square didukung oleh nilai signifikansi  $> 0,05$ .

**Tabel 5.4**  
***Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test***

<i>Step</i>	<i>Chi-square</i>	<i>df</i>	<i>Sig.</i>
1	12.753	8	0.121

Hasil pengujian (lihat Tabel 5.4) menunjukkan *Chi-square* sebesar 12.753 dengan nilai probabilitas signifikan sebesar  $0.121 > 0,05$  maka hipotesis nol diterima. Hal ini berarti model regresi layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya, karena tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati. Atau dapat dikatakan bahwa model mampu memprediksi nilai observasinya.

**Tabel 5.5.**  
***Hasil Pengujian Nagelkerke's R Square Model Summary***

<i>Step</i>	<i>-2 Log likelihood</i>	<i>Cox &amp; Snell R Square</i>	<i>Nagelkerke R Square</i>
1	157.588 <sup>a</sup>	0.121	0.192

Untuk melihat kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel *financial distress*, digunakan nilai Cox dan Snell R Square dan Nagelkerke R Square. Nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,192 (lihat table 5.5.) yang lebih besar dari pada Cox dan Snell R Square, yang menunjukkan bahwa kemampuan ketiga variabel bebas dalam menjelaskan varians *financial distress* adalah sebesar 19.2% dan terdapat 80,8% faktor lain yang menjelaskan varians *financial distress*.

### 5.2.3. Uji Multikolinieritas

**Tabel 5.6.**  
**Correlation Matrikx**

		Constant	Institutional	Likuiditas	Leverage
Step 1	Constant	1.000	-0.154	-.374	-.807
	Institutional	-0.154	1.000	0.034	0.042
	Likuiditas	-0.374	0.034	1.000	0.165
	Leverage	-0.807	0.042	0.165	1.000

Dari Tabel 5.6 dapat diketahui bahwa tidak ada terjadi multikolinieritas antara variabel yang 1 dengan variabel lainnya karena hasil tabel uji menunjukkan nilai  $< 0,9$ .

### 5.2.4. Uji regresi Logistik Biner & Uji Hipotesis (Uji Wald)

**Tabel 5.7.**  
**Uji Wald**

Variabel	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Institutional	3.480	1.494	5.423	1	0.020	32.462
Likuiditas	-0.001	0.000	4.935	1	0.026	0.999
Leverage	-0.696	0.530	1.728	1	0.189	0.498
Constant	1.726	0.379	20.771	1	0.000	5.619

Berdasarkan tabel 5.7 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi kepemilikan institusional dan likuiditas  $< 0,05$  hal ini menunjukkan H1 diterima, penelitian ini kontradiksi dengan penelitian Crutchley (1999), Fan et al (2013) dan Rus et al (2013). Pengujian atas H2 menunjukkan bahwa H2 diterima. Semakin rendah tingkat likuiditas semakin tinggi kemungkinan financial distress perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Khaliq et al (2014) dan John (1993). Nilai signifikansi leverage  $> 0.05$  menunjukkan bahwa H3 ditolak.

### 5.2.5. Uji Ketepatan Prediksi

**Tabel 5.8.**  
**Classification Table**

	Observed	Predicted		
		FD		Percentage Correct
		Distress	Sehat	
Step 1	Distress	4	32	11.1
Distress	Sehat	2	144	98.6
	Overall			81.3
	Percentage			

Dari Tabel 5.8. dapat dilihat bahwa prediksi perusahaan Distress berjumlah 36, hasil observasi menunjukkan 32 perusahaan yang sehat sehingga ketepatan prediksi adalah 11.1%. Prediksi perusahaan sehat berjumlah 146, hasil observasi menunjukkan 144 perusahaan yang mengalami distress sehingga ketepatan prediksi 98.6%. Ketepatan prediksi secara keseluruhan sebesar 81,3%.

## 6. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan likuiditas memiliki kontribusi terhadap financial distress. Sedangkan *leverage* tidak memiliki kontribusi terhadap terjadinya *financial distress*.

Artinya, solusi yang dapat diambil oleh perusahaan terhadap faktor kepemilikan institusional adalah perusahaan harus berusaha meningkatkan peran monitoring dari institusional guna meminimalisir perbedaan kepentingan manajer dan *shareholder*, sehingga makin bertambahnya kepemilikan institusional dapat mengurangi kemungkinan *financial distress*. Kepemilikan institusional dalam perusahaan jangan hanya menjadi alat untuk memenuhi tuntutan perundang-undangan dan hukum suatu negara, misalnya peraturan mengenai penerapan *Good Corporate Governance*. Sedangkan sehubungan dengan faktor likuiditas, perusahaan harus menjaga proporsi hutang lancar yang dapat dibiayai oleh aset lancar perusahaan. Jika tidak maka perusahaan akan masuk pada level financial distress dan selanjutnya akan mengalami kebangkrutan. Perusahaan tidak perlu melakukan restrukturisasi terhadap struktur modal. Karena struktur modal yang ada saat ini bukanlah pemicu financial distress.

Penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan periode waktu yang lebih panjang sehingga data yang diperoleh lebih andal. Kemudian disarankan untuk melakukan pengujian tidak hanya terhadap pengaruh struktur institusional, tetapi juga terhadap struktur kepemilikan manajerial dan kepemilikan dewan direksi sehingga keseluruhan unsur struktur kepemilikan diuji secara keseluruhan dan diperoleh hasil untuk menentukan kepemilikan yang memberikan kontribusi terhadap financial distress.

## 7. Daftar Pustaka

- Altman, E. 1968. Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, XXIII(4), 589-609
- Baimwera, B. and Muriuki, A. M. 2014. International Journal of Current Business and Social Science. Analysis of Corporate Financial Distress Determinants: a Survey Of Non-Financial Firms Listed In The NSE. 1(2), 58-80.
- Browning, E. S. and Jonathan Weil, 2002, Burden of doubt: Stocks Take a Beating as Accounting Worries Spread Beyond Enron, Wall Street Journal, 39(5), 5-27
- Fan, J. P. H., Huang J. and Zhu, N. 2013. Institutions, ownership structures, and distress resolution in China. Journal of Corporate Finance, 23, 71-87.
- Jensen, Michael C, dan W.H. Meckling. 1976. Theory of the Firm : Managerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics. 3(4), 305- 360
- John, T.A. 1993. Accounting measures of corporate Liquidity, Leverage and Costs of Financial Distress. Financial management. 22(3), 91-101.
- Ohlson, J. 1980. Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy. Journal of Accounting Research 19, 109-131.
- Khaliq, A., Altarturi, B. H. M., Thaker, H. M. T., Harun, M. Y., and Nahar, N. 2014. Identifying Financial Distress Firms: A Case Study of Malaysia's Government Linked Companies (GLC). International Journal of Economics, Finance and Management, 3(3), 141-150.
- Pranowo, K., Achsani, N. A, Manurung, A. H. and Nuryartono, N. 2010. International Research journal of Finance and Economics. Determinant of Corporate Financial Distress in an Emerging Market Economy: Empirical Evidence from the Indonesian Stock Exchange 2004-2008. 52, 80-90.
- Opler T. C. and Titman S. 2012. Financial Distress and Corporate Performance. The Journal of Finance. 4(3), 1015-1040.
- Platt, H. and M. B. Platt. 2006. Understanding Differences Between Financial Distress and Bankruptcy. Review of Applied Economics, 2( 2), 211-227.
- Platt Harlan D., Platt Marjorie B., (2002). "Predicting Corporate Financial distress:reflection on choice-based sample bias, Journal of Economics and Finance, 26(2), 184-197.
- Rus, Md. R., Mohd. K. N., Latif, R. A. and Alassan, Z. N. 2013. Ownership Structure and Financial Distress. Journal of Advanced Management Science, 1(4), 363-367.
- Wang, Z., dan X. Deng. 2006. "Corporate Governance and Financial Distress." *The Chinese Economy* 39(5), 5-27.
- Weiwei, D. dan Jiming, L. 2011. An Empirical Study on the Corporate Financial Distress Prediction Based on Logistic Model: Evidence from China's Manufacturing Industry. International Journal of Digital Content Technology and its Applications. 5(6). 368-379.
- Wruck, Karen Hopper, 1990, Financial Distress, Reorganization, and Organizational Efficiency. Journal of Financial Economics, 27, 419-444.

Zmijewski, M. 1984. Methodological Issues Related to Estimation of Financial Distress Prediction Models. *Journal of Accounting Research*, 22, 59-82.

## **Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Asuransi Di BEI 2009-2012**

Robert Lambey  
(Email : robert\_lambey@yahoo.com)

### ***Abstract***

*The purpose of this study to know the influence of fundamental factors that ROA, DER, TATO, and CR on stock price. In this case the researchers used data in the form of financial statements food and beverage companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX). Researchers used a population of 10 companies listed on the Stock Exchange period 2009-2012. The data used financial statements are the financial statements that have been published in the Indonesian Capital Market Directory (ICMD) in 2013 and in www.idx.co.id. The analysis tool used is multiple regression analysis, t test, F test and the coefficient of determination was tested with the classical assumption. Based on the analysis of data it can be concluded that the variable DER and CR have a significant effect on stock price.*

*Keywords: Financial statements, Fundamental factors, Stock price.*

### **1. Pendahuluan**

Pasar modal memiliki peranan penting dalam perkembangan dunia usaha, dimana peran dari pasar modal adalah sebagai lembaga perantara yang menghubungkan investor yang hendak menanamkan dananya pada perusahaan yang menjanjikan keuntungan dan perusahaan yang bisa memenuhi keinginan dari investor dalam memberikan keuntungan yang memadai melalui kinerja yang baik dan resiko yang kecil. Peranan pasar modal pada kegiatan perekonomian suatu negara adalah menjadi sumber pendanaan alternatif bagi suatu perusahaan sebagai sumber pembiayaan modern. Pasar modal dapat membentuk suatu simbiosis mutualisme antara investor dan perusahaan dalam suatu lingkungan pengalokasian dana secara efisien, dimana melalui pasar modal pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dapat memilih alternatif investasi yang memberikan *return* yang paling optimal dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam suatu pasar modal. Pengetahuan yang memadai dan penilaian yang cermat dan analisis yang tepat dibutuhkan oleh investor dalam menginvestasikan dananya di pasar modal. Menurut Sunariyah (2006, h.32), perusahaan memiliki berbagai alternatif sumber pendanaan untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan yang dapat berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan. Alternatif pendanaan dari dalam perusahaan dengan menggunakan laba yang ditahan perusahaan. Sedangkan alternatif pendanaan dari luar perusahaan dapat berasal dari kreditur berupa utang maupun pendanaan yang bersifat penyertaan dalam bentuk saham. Pendanaan melalui mekanisme penyertaan dilakukan dengan cara menjual saham perusahaan kepada masyarakat disebut penawaran umum atau dikenal dengan istilah *go public*.

Banyaknya perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar modal



membuat banyak para pemodal tertarik untuk menginvestasikan dananya dalam bentuk saham karena investasi dalam bentuk saham akan menjanjikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi daripada menabungnya di bank, baik dari deviden maupun dari capital gain. Menurut Tjptono dan Hendy (2006, h.6), saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Menurut Fahmi (2012, h.86), dengan membeli dan memiliki saham investor akan memperoleh beberapa keuntungan sebagai bentuk kewajiban yang harus diterima yaitu memperoleh *capital gain* (selisih antara harga beli dan harga jual), memperoleh *dividen* (pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan), dan memiliki hak suara bagi pemegang saham biasa. Adanya keuntungan yang tinggi di dalam berinvestasi dalam bentuk saham dibarengi juga dengan resiko yang tinggi, salah satunya adalah adanya variasi harga saham yang ditawarkan oleh setiap perusahaan yang sahamnya dijualnya di pasar modal.

Investor di pasar modal sangat memperhatikan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan, menunjang, dan meningkatkan profit perusahaan (Ulupui,2006). Investor sangat membutuhkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan guna memprediksi harga saham di pasar modal, termasuk kondisi keuangan perusahaan di masa depan. Analisis untuk memprediksi harga saham dapat menggunakan analisis rasio keuangan berdasarkan informasi keuangan perusahaan. Informasi akuntansi dalam bentuk rasio keuangan memiliki kemampuan prediksi ketika diasosiasikan dengan harga saham. Untuk dapat menginterpretasikan informasi akuntansi yang relevan dengan tujuan dan kepentingan pemakainya dikembangkan seperangkat teknik analisis yang didasarkan pada laporan keuangan yang dipublikasikan. Salah satu teknik tersebut yang populer diaplikasikan dalam praktek bisnis adalah analisis rasio keuangan. Hasil rasio keuangan merupakan alat yang digunakan untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Rasio keuangan yang berasal dari laporan keuangan ini sering disebut faktor fundamental perusahaan yang dilakukan dengan teknik analisis fundamental. Bagi perusahaan-perusahaan yang *go public* diharuskan menyertakan rasio keuangan yang relevan sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 (BEJ).

Riset mengenai kegunaan informasi akuntansi (laporan keuangan) dalam hubungannya dengan harga saham di Bursa Efek Jakarta telah banyak dilakukan, antara lain sebagai berikut. Machfoedz (1994) menguji manfaat rasio keuangan dalam memprediksi perubahan laba perusahaan pada masa depan pada 89 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ dari tahun 1989-1993. Asyik (1999) menemukan bahwa rasio neraca dan laba rugi memiliki hubungan yang lebih kuat dengan *return* saham dibandingkan dengan rasio arus kas. Kennedy JSP, (2003), meneliti pengaruh ROA, ROE, *earnings per share*, *profit margin*, *asset turnover*, *rasio leverage*, dan *debt to equity ratio* terhadap *return* saham. Triyono dan Jogiyanto (2000) meneliti hubungan

kandungan informasi arus kas, komponen arus kas, dan laba akuntansi dengan harga saham atau *return* saham. Tuasikal (2001) menguji manfaat informasi akuntansi dalam memprediksi *return* saham. Mirip dengan Tuasikal sebelumnya Parawiyati et al. (2000) meneliti penggunaan informasi keuangan untuk memprediksi keuntungan investasi bagi investor di pasar modal. Hasil pengujiannya menunjukkan bahwa variabel informasi keuangan tersebut berpengaruh signifikan sebagai prediktor laba dan arus kas untuk satu, dua, dan empat tahun ke depan. Selain itu, Natarsyah S. (2002) menganalisis pengaruh beberapa faktor fundamental dan risiko sistematis terhadap harga saham. Penelitiannya merupakan studi terhadap 16 industri barang konsumsi yang *go public* di pasar modal dalam periode 8 tahun (1990—1997) dengan mengasumsikan bahwa harga saham merupakan fungsi dari ROA, ROE, *beta*, *book value*, *debt/equity* dan *required rate of return*. Setelah melakukan pengujian terhadap hipotesis diperoleh hasil bahwa faktor fundamental seperti *return on assets*, *dividend payout ratio*, *debt to equity ratio*, *book value equity per share*, dan indeks beta berpengaruh terhadap harga saham perusahaan. Uraian di atas menunjukkan bahwa hasil penelitian mengenai pengaruh rasio keuangan terhadap harga atau *return* saham masih sangat bervariasi. Melihat laba dan juga *leverage* masih menjadi perhatian yang penting bagi investor maka penelitian ini ingin menganalisis kembali temuan penelitian sebelumnya dari sudut fundamental perusahaan, yaitu rasio yang terdapat dalam laba (profitabilitas), terutama ROA, ROE, *leverage*, juga rasio likuiditas dan aktivitas terhadap tingkat imbal hasil (*return*) saham perusahaan-perusahaan yang masuk kategori industri barang konsumsi di BEJ.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan temuan empiris tentang pengaruh faktor-faktor fundamental perusahaan yaitu ROA, DER, TATO, dan CR terhadap harga saham pada perusahaan-perusahaan yang masuk kategori asuransi yang terdaftar di BEJ sejak tahun 2009—2012.

Berdasarkan pembahasan tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Apakah variabel *ROA* sebagai salah satu proksi faktor fundamental perusahaan berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI 2009-2012?
- 2) Apakah variabel *DER* sebagai salah satu proksi faktor fundamental perusahaan berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI 2009-2012?
- 3) Apakah TATO sebagai salah satu proksi faktor fundamental perusahaan berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI 2009-2012?
- 4) Apakah variabel Current Ratio sebagai salah satu proksi faktor fundamental perusahaan berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI 2009-2012?
- 5) Apakah variabel *ROA*, *DER*, *TATO*, dan *CR* secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI 2009-2012?

### Definisi Operasional Variabel

Untuk menjelaskan variabel-variabel yang sudah diklasifikasikan maka perlu definisi operasional untuk masing-masing variabel yang ada:

1. Rasio Likuiditas merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. *Profitability* dapat diukur beberapa hal yang berbeda, namun dalam dimensi yang saling terkait. Pertama, terdapat hubungan antara *profit* dengan *sales* sehingga terjadi *residual return* bagi perusahaan per rupiah penjualan. Pengukuran yang lainnya adalah *return on investment* (ROI) atau disebut juga *return on asset* (ROA), yang berkaitan dengan *profit* dan investasi atau aset yang digunakan untuk menghasilkannya. Variabel yang digunakan sebagai proksi rasio likuiditas yang juga merupakan salah satu faktor internal perusahaan adalah ROA. *Return on asset* (ROA) adalah kemampuan perusahaan memanfaatkan aktiva untuk memperoleh laba. Ratio ini mengukur tingkat kembalian investasi yang dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana (aktiva) yang dimilikinya. *return on asset* (ROA) (Hanafi dan Halim, 2003 : 84) dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{LABA BERSIH}}{\text{TOTAL AKTIVA}} \times 100\%$$

2. Rasio *Leverage* adalah rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang. Beberapa analis menggunakan istilah rasio solvabilitas, yang berarti kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangannya. Variabel yang digunakan sebagai proksi rasio leverage yang juga merupakan salah satu faktor internal perusahaan adalah DER.

$$\text{DER} = \frac{\text{TOTAL HUTANG}}{\text{MODAL SENDIRI}}$$

3. Rasio aktivitas menggambarkan hubungan antara tingkat operasi perusahaan (*sales*) dengan aset yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan operasi perusahaan tersebut. Rasio aktivitas juga dapat digunakan untuk memprediksi modal yang dibutuhkan perusahaan (baik untuk kegiatan operasi maupun jangka panjang). Misalnya untuk meningkatkan penjualan akan membutuhkan tambahan aset. Rasio aktivitas memungkinkan para analis menduga kebutuhan ini serta menilai kemampuan perusahaan untuk mendapatkan aset yang dibutuhkan untuk mempertahankan tingkat pertumbuhannya. Variabel yang digunakan sebagai proksi rasio aktivitas yang juga merupakan salah satu faktor fundamental perusahaan adalah *total asset turn over* (TATO).

$$\text{TATO} = \frac{\text{PENJUALAN}}{\text{TOTAL AKTIVA}}$$

4. Rasio modal kerja adalah rasio yang didasarkan atas klasifikasi aset dan *liabilities* dalam bentuk kategori lancar dan tidak lancar. Perbedaan secara tradisional antara *current asset* dan *liabilities* didasarkan pada jatuh tempo kurang dari satu tahun atau berdasarkan siklus operasi perusahaan yang normal (jika lebih). Variabel yang digunakan sebagai proksi rasio modal kerja yang juga merupakan salah satu faktor fundamental perusahaan adalah *Current Ratio (CR)*.

$$CR = \frac{\text{AKTIVA LANCAR}}{\text{HUTANG LANCAR}}$$

5. Menurut Sunariyah (2006, h.128), harga saham adalah harga suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung di bursa efek. Harga saham dapat dipengaruhi oleh situasi pasar antara lain harga saham dipasar perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang akan *go public* (emiten), berdasarkan analisis fundamental perusahaan. Peranan penjamin emisi pada pasar perdana selain menentukan harga saham, juga melaksanakan penjualan saham kepada masyarakat sebagai calon pemodal. Sedangkan harga saham di pasar sekunder ditentukan oleh permintaan dan penawaran antara pembeli dan penjual.

### **Metode Penelitian**

Populasi pada penelitian ini menggunakan perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012 yang berjumlah 10 perusahaan. Nama-nama perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI adalah sebagai berikut:

NO	NAMA EMITEN	KODE SAHAM
1	ASURANSI BINA DANA ARTA TBK	ABDA
2	ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA TBK	AHAP
3	ASURANSI MULTI ARHA GUNA TBK	AMAG
4	ASURANSI BINTANG TBK	ASBI
5	ASURANSI DAYIN MITRA TBK	ASDM
6	ASURANSI JAYA TANIA TBK	ASJT
7	ASURANSI RAMAYANA TBK	ASRM
8	LIPPO GENERAL INSURANCE TBK	LPGI
9	MASKAPAI REASURANSI INDONESIA TBK	MREI
10	PANIN INSURANCE TBK	PNIN

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode observasi *nonparticipant*. Data yang digunakan berdasarkan sumbernya pada penelitian ini merupakan data sekunder. Data tersebut diperoleh melalui laporan ringkasan kinerja perusahaan tercatat (*financial data and ratio*) perusahaan asuransi yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012, melalui situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Alat analisis data yang digunakan uji asumsi klasik serta regresi linear berganda. Uji hipotesis menggunakan uji t dan uji F.

### Hasil dan Pembahasan

NO	NAMA EMITEN	KODE SAHAM	ROA (X)			
			2009	2010	2011	2012
1	ASURANSI BINA DANA ARTA TBK	ABDA	(5.03)	5.36	7.92	6.61
2	ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA TBK	AHAP	(7.22)	7.44	9.95	6.56
3	ASURANSI MULTI ARHA GUNA TBK	AMAG	9.72	9.07	9.08	10.90
4	ASURANSI BINTANG TBK	ASBI	(1.95)	1.10	3.71	7.11
5	ASURANSI DAYIN MITRA TBK	ASDM	(2.93)	4.59	6.58	2.87
6	ASURANSI JAYA TANIA TBK	ASJT	(5.16)	6.58	7.50	6.59
8	ASURANSI RAMAYANA TBK	ASRM	(6.06)	5.33	6.10	3.05
9	LIPPO GENERAL INSURANCE TBK	LPGI	(3.75)	6.12	4.70	2.28
10	MASKAPAI REASURANSI INDONESIA TBK	MREI	(9.39)	10.34	10.96	12.40
11	PANIN INSURANCE TBK	PNIN	(7.40)	9.41	9.28	(6.44)

NO	NAMA EMITEN	KODE SAHAM	DER (X)			
			2009	2010	2011	2012
1	ASURANSI BINA DANA ARTA TBK	ABDA	3.18	3.28	173	189
2	ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA TBK	AHAP	0.91	1.16	106	2.05
3	ASURANSI MULTI ARHA GUNA TBK	AMAG	0.86	0.86	0.65	0.76
4	ASURANSI BINTANG TBK	ASBI	1.14	1.66	140	2.10
5	ASURANSI DAYIN MITRA TBK	ASDM	1.33	1.38	1.26	4.68
6	ASURANSI JAYA TANIA TBK	ASJT	0.78	0.73	103	1.18
8	ASURANSI RAMAYANA TBK	ASRM	1.87	2.23	2.61	5.67
9	LIPPO GENERAL INSURANCE TBK	LPGI	0.27	0.27	0.36	0.45
10	MASKAPAI REASURANSI INDONESIA TBK	MREI	1.37	1.44	1.40	1.42
11	PANIN INSURANCE TBK	PNIN	0.80	0.72	0.44	0.40

NO	NAMA EMITEN	KODE SAHAM	TATO(x)			
			2009	2010	2011	2012
1	ASURANSI BINA DANA ARTA TBK	ABDA	0.65	0.50	0.49	0.36
2	ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA TBK	AHAP	0.79	0.92	1.01	0.72
3	ASURANSI MULTI ARHA GUNA TBK	AMAG	0.43	0.38	0.30	0.27
4	ASURANSI BINTANG TBK	ASBI	0.32	0.30	0.38	0.37
5	ASURANSI DAYIN MITRA TBK	ASDM	0.37	0.34	0.35	0.12
6	ASURANSI JAYA TANIA TBK	ASJT	0.51	0.60	0.70	0.93
8	ASURANSI RAMAYANA TBK	ASRM	0.64	0.52	0.46	0.33
9	LIPPO GENERAL INSURANCE TBK	LPGI	0.28	0.26	0.34	0.31
10	MASKAPAI REASURANSI INDONESIA TBK	MREI	0.90	0.86	0.82	0.64
11	PANIN INSURANCE TBK	PNIN	0.14	0.16	0.22	0.18

NO	NAMA EMITEN	KODE SAHAM	CR (X)			
			2009	2010	2011	2012
1	ASURANSI BINA DANA ARTA TBK	ABDA	123	126	150	147
2	ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA TBK	AHAP	199	178	184	144
3	ASURANSI MULTI ARHA GUNA TBK	AMAG	2.10	2.12	2.51	2.20
4	ASURANSI BINTANG TBK	ASBI	160	142	154	139
5	ASURANSI DAYIN MITRA TBK	ASDM	167	166	172	120
6	ASURANSI JAYA TANIA TBK	ASJT	2.24	2.36	1.78	1.71
8	ASURANSI RAMAYANA TBK	ASRM	1.41	1.36	1.32	1.12
9	LIPPO GENERAL INSURANCE TBK	LPGI	4.57	4.61	3.67	6.02
10	MASKAPAI REASURANSI INDONESIA TBK	MREI	164	162	166	166
11	PANIN INSURANCE TBK	PNIN	3.18	3.39	3.28	3.48

KODE SAHAM	HRG SAHAM (Y)			
	2009	2010	2011	2012
ABDA	217.00	376.00	770.00	1830.00
AHAP	114.00	125.00	200.00	190.00
AMAG	95.00	144.00	147.00	230.00
ASBI	290.00	255.00	275.00	490.00
ASDM	180.00	600.00	500.00	740.00
ASJT	420.00	420.00	420.00	460.00
ASRM	990.00	1040.00	820.00	980.00
LPGI	570.00	1160.00	1690.00	1990.00
MREI	285.00	550.00	760.00	1710.00
PNIN	255.00	570.00	415.00	520.00

Berdasarkan Uji T dengan menggunakan SPSS didapat hasil sebagai berikut:

Coefficientsa						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-523.648	410.186		-1.277	.210
	ROA	17.952	11.713	.222	1.533	.134
	DER	214.450	83.449	.490	2.570	.015
	TATO	144.336	332.972	.071	.433	.667
	CR	310.361	94.537	.683	3.283	.002

Dependent Variable: harga saham

Dari data yang ada diketahui persamaan yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = -523,648 + 17,952X_1 + 214,450X_2 + 144,336X_3 + 310,361X_4$$

Dimana:

Y adalah Harga Saham

X1 adalah ROA

X2 adalah DER

X3 adalah TATO

X4 adalah CR

Dari data ini dapat pula dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Konstanta 523,648 menunjukkan bahwa apabila Variable ROA, DER, TATO, dan CR adalah konstan maka nilai harga saham adalah negatif.
2. Koefisien ROA sebesar 17,952 berarti koefisien Return Of Asset (ROA) memiliki pengaruh searah terhadap Harga Saham yaitu ROA naik maka Harga Saham juga naik. Signifikansi ROA adalah 0,134 ( $>0,05$ ) maka

- ROA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Harga Saham.
3. Koefisien DER sebesar 214,450 berarti koefisien Debt Equity Ratio (DER) memiliki pengaruh searah terhadap Harga Saham yaitu DER naik maka Harga Saham juga naik. Signifikansi DER adalah  $0,015 (<0,05)$  maka DER berpengaruh signifikan terhadap Harga Saham.
  4. Koefisien TATO sebesar 144,337 berarti koefisien Total Asset Turn Over (TATO) memiliki pengaruh searah terhadap Harga Saham yaitu TATO naik maka Harga Saham juga naik. Signifikansi TATO adalah  $0,667 (>0,05)$  maka TATO tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Harga Saham.
  5. Koefisien CR adalah sebesar 310,361 berarti Current Ratio (CR) memiliki pengaruh searah terhadap Harga Saham yaitu CR naik maka Harga Saham juga naik. Signifikansi CR adalah  $0,02 (<0,05)$  maka CR berpengaruh secara signifikan terhadap Harga Saham.
  6. Dari output SPSS didapati hasil R2 sebagai berikut:

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.533	.284	.202	440.44958
a. Predictors: (Constant) CR,ROA, TATO, DER				
b. Dependent Variable: HARGA SAHAM				

Dari data ini diketahui pada ROA, DER, TATO, CR secara bersama-sama dapat menerangkan variabel perubahan laba sebesar 28,4% berarti lemah untuk menjelaskan variabel dependen yaitu Harga Saham.

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2691555.667	4	672888.917	3.469	.017 <sup>a</sup>
	Residual	6789854.108	35	193995.832		
	Total	9481409.775	39			

a. Predictors: (Constant), CR, ROA, TATO, DER  
b. Dependent Variable: HRG SAHAM

Dari data Anova diketahui bahwa berdasarkan uji F didapat nilai sebesar 3,469 dengan signifikansi  $0,017 (<0,05)$  berarti variabel-variabel independen (ROA,DER, TATO,CR) mempengaruhi secara bersama-sama secara simulatan terhadap variabel dependen(Harga Saham). Hal ini juga menunjukkan bahwa variabel-variabel independen sudah tepat dalam mengukur variabel dependennya sehingga model regresi sudah fit.

Pengujian Asumsi Klasik.

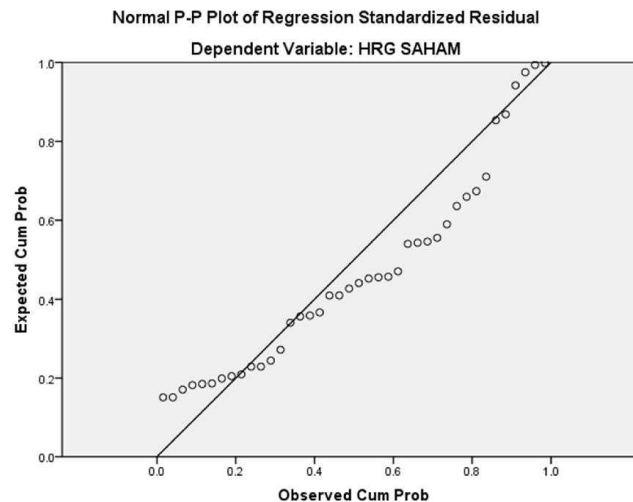
Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Agar hasil regresi sah maka harus terpenuhi asumsi klasik, yaitu



Normalitas, autokorelasi, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas.

(1) **Uji Normalitas.**

Hasil analisis terhadap asumsi normalitas ini dikatakan baik apabila semua data tersebar secara merata di sekitar garis horisontal mengikuti garis horisontal. Untuk penelitian ini didapatkan hasil sebagai berikut:



Berdasarkan gambar yang ada diketahui data tersebar merata di sekitar garis horisontal dan mengikuti garis horisontal (memenuhi uji Normalitas).

(2) **Uji Multikolinieritas.**

Multikolinieritas terindikasi apabila terdapat hubungan linier di antara variabel independen yang digunakan dalam model. Metode untuk menguji adanya multikolinieritas adalah bahwa nilai VIF variabel independent dibawah nilai 10 dan tolerance value diatas 0,10 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi. Hasil yang diperoleh dari Uji Multikolinieritas dengan menggunakan SPSS dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Coefficientsa				
Model		Collinearity Statistics		Kesimpulan
		Tolerance	VIF	
1	(Constant)			
	ROA	.978	1.023	Bebas Multikolinieritas
	DER	.562	1.779	Bebas Multikolinieritas
	TATO	.757	1.320	Bebas Multikolinieritas
	CR	.473	2.116	Bebas Multikolinieritas

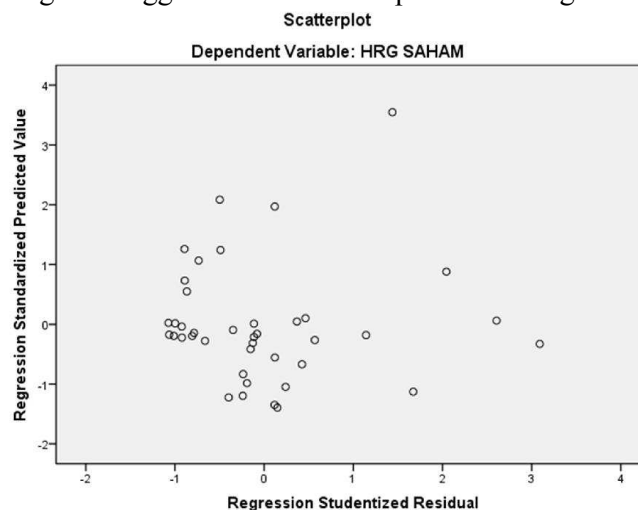
Dependent Variable: harga saham

(3) **Uji Heteroskedastisitas.**

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah variabel pengganggu mempunyai varian yang sama atau tidak. Heteroskedastisitas mempunyai suatu keadaan bahwa varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda. Salah satu metode yang digunakan untuk menguji ada tidaknya Heterokedastisitas akan mengakibatkan penafsiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien. Hasil dari penafsiran akan menjadi kurang dari semestinya. Heterokedastisitas bertentangan dengan salah satu asumsi dasar regresi linear, yaitu bahwa variasi residual sama untuk semua pengamatan atau disebut Homokedastisitas (Gujarati dalam Elmasari, 2010:53). Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas yaitu dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependent) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada atau tidaknya Heterokedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana Sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ( $Y_{\text{prediksi}} - Y_{\text{sesungguhnya}}$ ) yang telah distudentized. Dasar analisisnya adalah sebagai berikut:

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi Heterokedastisitas.
- Jika ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heterokedastisitas. Berdasarkan hasil pengujian Heterokedastisitas yang perhitungannya dengan menggunakan SPSS didapat hasil sebagai berikut:



Dari gambar di atas terlihat data tersebar dengan tidak beraturan diantara sumbu Y baik diatas nilai 0 maupun dibawah nilai 0, maka dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas terhadap data yang ada (uji heterokedastisitas terpenuhi). Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam regresi dimana variabel dependen tidak berkorelasi

dengan dirinya sendiri. Maksud korelasi dengan diri sendiri adalah bahwa nilai dari variabel dependen tidak berhubungan dengan nilai variabel itu sendiri, baik nilai variabel sebelumnya maupun nilai periode sesudahnya (Santosa & Ashari, 2009:240).

Dasar untuk menunjukkan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

HIPOTESIS	KEPUTUSAN	JIKA
Tidak ada autokorelasi positif	TOLAK	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	NO DECISION	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada autokorelasi negatif	TIDAK	$4 - dl \leq d \leq 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	NO DECISION	$4 - du \leq d \leq 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi positif maupun negatif	TIDAK DITOLAK	$du < d < 4 - du$

(Sumber: Imam Gozali, 2009, Analisis Multivariate dengan SPSS, Hal 100)

Model	Durbin-Watson	dl	du	4-dl	4-du	Hasil	Keterangan
Regresi	1.961	1.2848	1.7209	2.7152	2.2791	$1.7209 < 1.961 < 2.2791$	Tidak Ada Autokorelasi Positif maupun Negatif

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik (normalitas, autokorelasi, multikolinieritas, Heteroskedastisitas) diperoleh hasil analisis bahwa dalam model yang digunakan sudah tidak terjadi penyimpangan asumsi klasik, artinya model regresi pada penelitian dapat digunakan sebagai dasar analisis.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil uji t menunjukkan bahwa ROA, DER, TATO, CR berpengaruh positif terhadap Harga Saham. Variabel DER dan CR berpengaruh secara signifikan terhadap Harga Saham.
2. Hasil dari uji asumsi klasik (normalitas, autokorelasi, multikolinieritas, heteroskedastisitas) diperoleh hasil analisis bahwa dalam model yang digunakan sudah tidak terjadi penyimpangan asumsi klasik, artinya model regresi pada penelitian dapat digunakan sebagai dasar analisis.
3. Penelitian ini mempunyai keterbatasan dengan variabel yang digunakan yaitu hanya 4 variabel independent (ROA, DER, TATO, CR) dan 1 variabel Dependent (Harga Saham). Penelitian ini juga mempunyai keterbatasan dalam populasi yang digunakan yaitu hanya pada perusahaan yang masuk kategori Asuransi untuk data 2009-2012 yang ada di BEI.

### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan

diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan menggunakan jangka waktu pengamatan yang lebih lama.
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan populasi pada jenis industri yang berbeda selain Jenis Asuransi sehingga dapat dibandingkan pengaruh faktor-faktor fundamental tersebut terhadap harga saham.
3. Pengaruh keempat variabel masih kecil terhadap harga saham, oleh karena itu bagi peneliti yang akan meneliti dengan tema yang sama, sebaiknya jumlah variabel independen, agar hasil penelitian bisa lebih baik lagi.

### Daftar Pustaka

- Brigham, Eugene F. dan Joel F. Houston 2009, *Dasar - Dasar Manajemen Keuangan, Buku 1, Edisi 10*, Salemba Empat, Jakarta, hal 33-36.
- Darmadji, Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin 2006, *Pasar Modal di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta, hal 165-202
- Djarwanto 1996, *Mengenal Beberapa Uji Statistik dalam Penelitian*, Yogyakarta, Liberty, hal 134-164.
- Fadjrith, Asyik Nur dan Soelistyo, 2000. Kemampuan Rasio Keuangan dalam memprediksi laba, penetapan rasio keuangan sebagai discriminator, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Vol 15, No.3: Juli 2000, hal 313-331.
- Fahmi, Irham 2012, *Pengantar Pasar Modal*, edisi 1, Alfabeta, Bandung, hal 125-137.
- Hasan, Iqbal 2001, *Pokok-pokok Materi Statistika 2*, edisi 2, Bumi Aksara, Jakarta.
- Helfert, 1991, *Analisis laporan keuangan ( terjemahan Herman Wibowo)*. Edisi 7, Jakarta. Penerbit Erlangga, hal 7-13.
- Husnan, Suad 2009, *Dasar-dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas, Edisi 4*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, hal 150-168.
- Ghozali, Imam, 2009, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal 45-53.
- Indonesian Capital Market Directory (ICMD) tahun 2013, [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id).
- Kasmir 2010, *Analisa Laporan Keuangan*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 11-21.
- Krisnawati Br. Tarigan, Nurainun Bangun, dan Joanita 2007, *Analisis Pengaruh ROE dan EPS Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta*, *Jurnal Akuntansi*, Volume 7, Nomor 2, hal 173-194.
- Munawir, 2000. *Analisis laporan keuangan*, Yogyakarta, Liberty, hal 64-76.
- Rd. Neneng Rina Andriani dan Aryati Kusumastuti 2008, *Pengaruh Earning Per Share Terhadap Harga Pasar Saham*, *Jurnal Akuntansi FE Unsil*, Volume 3, Nomor 2., hal 67-87.
- Sunariyah 2006, *Pengetahuan Pasar Modal*, edisi 5, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, hal 4-12.

- Tandelilin, Eduardus 2010, *Portofolio dan Investasi Teori dan Aplikasi*, edisi 1, Kanisius, Yogyakarta, hal 342-343.
- Trihendradi, Cornelius 2008, *Analisis Data Statistik SPSS 16*, Andi, Yogyakarta, hal 110-115